



BUKU PUTIH

PEMERINTAHAN INDONESIA

**MASYARAKAT ILMU PEMERINTAHAN INDONESIA
(INDONESIAN SOCIETY OF GOVERNANCE STUDIES)**

Muhammad Labolo | Muchlis Hamdi | Jimly Asshiddiqie | Ramlan Surbakti | Purwo Santoso | Sadu Wasistiono
Irfan Ridwan Maksum | M. Aries Djaenuri | R. Siti Zuhro | Eko Prasojo | Miftah Thoha | Nurliyah Nurdin
Anthon Raharusun | Haryatmoko | Achmad Charris Zubair | Joko Siswanto | Ichsanuddin Noorsy
Prasetyantoko | Ahmad Erani Yustika | Bambang Hartadi Nugroho | Edy Prasetyono | Evi Fitriani





MASYARAKAT ILMU PEMERINTAHAN INDONESIA (INDONESIAN SOCIETY OF GOVERNANCE STUDIES)

- 🌐 <http://www.mipi.or.id>
- ✉️ pengurusmipi@gmail.com
- 蟏️ masyarakatilmupemerintahan
- ଓ Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia
- ଓ Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia



Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

- 📞 0858 5343 1992
- ✉️ eurekamediaaksara@gmail.com
- 📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-487-935-3

9 786234 879353

BUKU PUTIH

PEMERINTAHAN INDONESIA

Muchlis Hamdi, Jimly Asshiddiqie, Ramlan Surbakti, Purwo Santoso, Sadu Wasitiono, Irfan Ridwan Maksum, M. Aries Djaenuri, R. Siti Zuhro, Eko Prasojo, Miftah Thoha, Muhadam Labolo, Nurliah Nurdin, Anthon Raharusun, Haryatmoko, Achmad Charris Zubair, Joko Siswanto, Ichsanuddin Noorsy, Prasetyantoko, Ahmad Erani Yustika, Bambang Hartadi Nugroho, Edy Prasetyono, Evi Fitriani.



PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**BUKU PUTIH
PEMERINTAHAN INDONESIA**

Penulis	: Muchlis Hamdi, Jimly Asshiddiqie, Ramlan Surbakti, Purwo Santoso, Sadu Wasistiono, Irfan Ridwan Maksum, M. Aries Djaenuri, R. Siti Zuhro, Eko Prasojo, Miftah Thoha, Muhamad Labolo, Nurliah Nurdin, Antho Raharusun, Haryatmoko, Achmad Charris Zubair, Joko Siswanto, Ichsanuddin Noorsy, Prasetyantoko, Ahmad Erani Yustika, Bambang Hartadi Nugroho, Edy Prasetyono, Evi Fitriani.
Desain Sampul	: Ardyan Arya Hayuwaskita
Tata Letak	: Nurlita Novia Asri
ISBN	: 978-623-487-935-3

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, APRIL 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

**Eureka Media Aksara bekerjasama dengan
Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia**

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat, Taufik, dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan buku putih pemerintahan Indonesia. Buku putih itu sendiri diartikan sebagai buku yang memuat pemerintahan yang murni sebagaimana tercantum dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga tidak sedikit uraian buku ini terkandung pemerintahan yang muatannya idal dan cita-cita, bahkan bagi Sebagian orang sulit untuk dilaksanakan.

Sejak tahun 2013, sesungguhnya secara prinsip konsep buku putih ini sudah selesai. Namun penerbitannya tertunda karena dipandang perlu dilakukan pengendapan dan menambah beberapa materi tulisan sembari lebih memahami dinamika pemerintahan yang berkembang. Ternyata proses pengendapan menjadi lebih lama hingga mencapai sembilan tahun.

Kami sangat bersyukur karena setelah sembilan tahun, buku putih ini akhirnya bisa diterbitkan karena beberapa alasan, *pertama* MIPI merasa berkepentingan untuk menerbitkan buku ini, karena pemikiran-pemikiran para ahli pemerintahan perlu diketahui dan disebarluaskan ke masyarakat. Bawa ada yang pro dan kontra terhadap pemikiran dan pendapat tersebut, kami pandang hal yang biasa dalam konteks ilmiah. *Kedua*, selama ini dirasakan sulit menemukan referensi terkait pemerintahan Indonesia. Kelangkaan referensi itu cukup lama dikeluhkan oleh ilmuan, praktisi dan pemerhati pemerintahan. Memahami kondisi tersebut, MIPI hadir mengisi sedikit ruang bahan bacaan terkait pemerintahan Indonesia.

Untuk itu kami mengucapkan kepada dua ketua umum MIPI yang telah merintis lahirnya buku ini kemudian mengembangkannya. Kedua sosok penting tersebut ialah Bapak Fauzi Bowo dan Bapak Ridho Ficardo beserta segenap pengurus MIPI diperiode beliau-beliau yang luar biasa. Pada kesempatan

yang baik ini kami berterima kasih kepada Ketua Dewan Penasehat, Bapak Muh. Ryaas Rasyid yang tidak pernah bosan memotivasi pengurus, penulis dan penyunting sehingga buku ini betul-betul bisa diterbitkan.

Kami mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para penulis, antara lain Siti zuhro, Eko, Prasodjo, Jimly Asshiddiqie, Ramlan Surbakti, Irfan Ridwan Maksum, Muchlis Hamdi, Sadu Wasistiono, Aries Djaenuri, Ahmad Erani Yustika, Ichsanudin Noorsy, Muhamad Labolo, Nurliah Nurdin, Evi Fitriani, Edy Prasetyono, Bambang Hartadi Nugroho, Anthon Raharusun, Haryatmoko, A. Prasetyantoko Achmad Charris Zubair, dan Joko Siswanto.

Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pengurus MIPI yang membentuk suatu tim dan menjadi editor buku ini. Mereka antara lain Ika Sartika, Megandaru Widhi Kawuryan, Cyntia Febri Sri Indarti, Almaarif, Mutia Rahmah, Nur Saribulan, Hardianto Rahman, Ramadia Arifah, dan Vicky Amalia Putri Aztari yang telah bersedia turut berperan serta dalam penyelesaian buku ini.

Akhirnya Kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada penerbit yang bekerjasama dengan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia yang berkenan mencetak buah pikiran para ilmuan pemerintahan sehingga buku ini sampai ditangan para pembaca yang budiman. Kami yakin bahwa pemikiran-pemikiran tersebut tidak sepenuhnya sama dengan pemahaman para pembaca. Hal ini dimungkinkan karena tulisan-tulisan pada buku ini disusun berdasarkan pada suatu pemahaman, konteks dan masa sehingga terdapat kesenjangan dalam rentang waktu yang cukup lama. Meski demikian, kami percaya bahwa tulisan-tulisan tersebut tidak lepas dari cita-cita ideal pemerintahan Indonesia yang akan selalu hidup dalam praktek dan pengembangan Ilmu Pemerintahan. Akhirnya kepada para ilmuan. Praktisi dan pemerhati ilmu

pemerintahan, buku putih pemerintahan Indonesia ini kami
persesembahkan.

Jakarta, 22 Maret 2022

Ketua Umum

Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia

Dr. Drs. Bahtiar, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
PENDAHULUAN	1
BAGIAN PERTAMA	
PEMERINTAHAN	11
Prinsip-Prinsip Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan	
Oleh : Muchlis Hamdi	12
Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidential	
Oleh : Jimly Asshiddiqie	41
Negara dan Pemerintahan	
Oleh : Ramlan Surbakti	64
Bentuk Negara: Unitarianisme vs. Federalisme	
Oleh : Purwo Santoso	82
BAGIAN KEDUA	
PEMERITAHAN DAERAH	107
Pemerintahan Daerah	
Oleh : Sadu Wasistiono	108
Perkembangan Pemahaman dan Konsep Desentralisasi	
Oleh : Irfan Ridwan Maksum	139
Hubungan Kewenangan Antara Pusat dan Daerah	
Oleh : M.Aries Djaenuri	201
BAGIAN KETIGA	
POLITIK PEMERINTAHAN DAN	
ADMINISTRASI DAERAH.....	274
Birokrasi dan Politik	
Oleh : R. Siti Zuhro	275

Tantangan Kualitas Pemerintahan dalam Perubahan Global dan Transformasi Digital	
Oleh : Eko Prasojo	304
Perkembangan Birokrasi di Indonesia	
Oleh : Miftah Thoha	325
Mendekatkan Spirit Konstitusi dalam Pengaturan Pemerintahan Daerah	
Oleh : Muhadam Labolo.....	358
Paradoks Sentralisasi Politik dan Desentralisasi Pemerintahan: Membangun Demokrasi yang Mensejahterakan	
Oleh : Nurliah Nurdin	381
BAGIAN KEEMPAT	
HUKUM DAN ETIKA PEMERINTAHAN	393
Negara Sebagai Sistem Hukum Inkonsistensi Undang-Undang dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	
Oleh : Anthon Raharusun	394
Demokrasi dan Etika Publik	
Oleh : Haryatmoko.....	442
Dimensi Etika Politik dan Pemerintahan	
Oleh : Achmad Charris Zubair	474
Perkembangan Sistem Norma Menuju Terbentuknya Sistem Peradilan Etika	
Oleh : Jimly Asshiddiqie.....	494
Etika Pemerintahan	
Oleh : Joko Siswanto	590
BAGIAN KELIMA	
KESEJAHTERAAN SOSIAL.....	637
Pemerintah dan Kesejahteraan Masyarakat (IPM)	
Oleh : Ichsanuddin Noorsy	638
Keberlanjutan Fiskal dan Kesejahteraan Sosial	
Oleh : Prasetyantoko.....	685

Kemiskinan dan Gagasan Kesejahteraan Oleh : Ahmad Erani Yustika.....	707
BAGIAN KEENAM	
BATAS NEGARA DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI.....	728
Manifestasi dan Relevansi Politik Luar Negeri Bebas Aktif Oleh : Bambang Hartadi Nugroho.....	729
Perkembangan Asia Pasifik dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Oleh : Edy Prasetyono.....	756
Perbatasan Negara Republik Indonesia Oleh : Evi Fitriani.....	772

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejarah pemerintahan Indonesia diwarnai oleh lika-liku yang membuat negeri ini kurang lancar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik memerlukan birokrasi yang baik pula. Warisan pemerintahan kolonial Belanda memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap praktik birokrasi di Indonesia. Secara umum, nilai-nilai patrimonialisme, patronase dan feudalisme relatif merasuki sistem birokrasi sehingga hal ini acapkali membuat birokrasi tampak konservatif, sarat dengan pendekatan kekuasaan (*power culture*), kurang transparan, dan tidak akuntabel.

Era Pemerintahan Orde Lama (1945-1965) merupakan proses membangun landasan bagi tegaknya pemerintahan RI pasca kemerdekaan. Hal ini dilakukan dengan membangun filosofi yang didasarkan atas nilai-nilai khas karakter Indonesia dan perjuangan bangsa Indonesia sebagai fondasi yang kokoh. Semangat juang, nilai-nilai kepahlawanan dan revolusioner yang dimiliki oleh pemimpin bangsa waktu itu mampu menggelorakan semangat rakyat Indonesia dan membuat mereka bangga Indonesia menjadi negara merdeka. Di masa itu, nuansa politik sangat dominan yang ditandai dengan sistem multi partai, kegaduhan politik, kabinet yang silih berganti, konflik antara pusat dan daerah yang ditunjukkan dengan pembentukan negara-negara bagian . Selain itu, di masa ini terjadi beberapa konflik dan pemberontakan yang bernuansa separatis. Pemberontakan tersebut muncul sebagai bentuk kekecewaan daerah terhadap pemerintah pusat yang dianggap mengabaikan aspirasi dan kepentingan rakyat setempat. Kondisi ini menjadikan kinerja pemerintahan kurang efektif sehingga membuat ditetapkannya demokrasi terpimpin.

Berbeda dengan pemerintahan era Orde Lama, pemerintahan era Orde Baru (1965-1998) kurang memberikan peluang kepada tumbuh kembangnya partai politik. Bahkan partai-partai yang telah ada dan menjadi peserta pemilihan umum pada tahun 1971 mengalami fusi (menjadi tiga partai saja) dan puncaknya adalah



BAGIAN PERTAMA PEMERINTAHAN



Prinsip-Prinsip Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan

Oleh : Muchlis Hamdi



Pemerintahan merupakan gejala kehidupan manusia yang terjadi dalam suasana ketika orang per orang bersepakat untuk hidup bersama dalam suatu negara. Dengan berpemerintahan setiap orang akan menjadi warganegara yang memiliki hak dan kewajiban yang diberikan oleh negara. Peranan sebagai warganegara menjadi harapan bagi setiap orang untuk memunculkan kemanfaatan maksimal dalam upaya mewujudkan hidup yang lebih baik dari waktu ke waktu. Di sisi lain, negara melalui proses pemerintahan memainkan peranan untuk mengelola kekuasaan pemerintahan dengan tujuan utama memenuhi harapan warganegara untuk hidup yang lebih baik dari waktu ke waktu tersebut.

Pengelolaan kekuasaan pemerintahan yang dilakukan oleh negara dapat berlangsung dengan banyak pilihan. Berbagai pilihan tersebut berkaitan dengan penyatuan atau pemisahan kekuasaan pemerintahan, penentuan bentuk negara, serta penentuan bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan.

A. Pemisahan Kekuasaan Dalam Pemerintahan

Sejarah kehidupan manusia banyak dipenuhi oleh peristiwa yang menunjukkan pengelolaan kekuasaan pemerintahan yang sewenang-wenang oleh para penguasa. Kisah Firaun di Mesir dan kisah Lodewijk XIV di Perancis merupakan dua kisah yang menggambarkan kesewenang-wenangan penguasa tersebut. Sejarah juga mencatat bahwa kesewenang-wenangan penguasa selalu berujung pada penderitaan rakyat. Catatan tersebut telah mendorong lahirnya pemikiran tentang bagaimana pengelolaan kekuasaan pemerintahan negara sebaiknya dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Saragih, Bintan Regen. 1981. Himpunan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemerintah Daerah Di Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.

Presidential Cabinet (Indonesia).
http://en.wikipedia.org/wiki/Presidential_Cabinet_%28Indonesia%29 diakses tanggal 1 Maret 2014

Sejarah Nusantara pada era kerajaan Hindu-Buddha. Sumber:
http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Nusantara_pada_era_kerajaan_Hindu-Buddha
diakses tanggal 1 Maret 2014

Majapahit. <http://id.wikipedia.org/wiki/Majapahit> diakses
tanggal 15 Desember 2014

Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidential

Oleh : Jimly Asshiddiqie



A. Pendahuluan

Banyak sekali keluhan yang biasa kita dengar dan kita baca di pelbagai media mengenai sistem pemerintahan kita dewasa ini. Sebagian mempersoalkan sistemnya, dan sebagian lagi mempersoalkan kinerja orang yang menyelenggaraan sistem itu dalam praktik. Jika persoalannya terletak pada sistem, maka jalan keluarnya tiada lain tentu harus dengan melakukan perbaikan sistem norma aturannya dan penataan fungsi-fungsi kelembagaannya. Namun, jika persoalannya terletak pada kinerja orang dalam proses penyelenggaraannya, maka solusinya tentu terletak pada kualitas orang per orang penyelenggara kekuasaan negara dalam sistem pemerintahan yang sedang dipraktikkan dewasa ini.

Ada dua cara pandang yang dapat kita pakai untuk menilai peranan kedua faktor orang dan sistem itu dalam praktik. Pertama, dalam aliran determinisme, sistem dipandang merupakan faktor yang menentukan kualitas orang yang diperlukan untuk dicapainya tujuan bersama dalam organisasi. Karena itu, manakah sistemnya baik, maka orang yang terdapat di dalamnya akan menjadi baik pula dengan sendirinya. Tetapi, menurut cara pandang kedua, sistem itu hanyalah produk dari orang, karena itu sistem tidak dapat diharapkan menjadi baik kalau tidak ada orang yang dapat menggerakkan sistem itu berfungsi dengan baik. Jika orangnya baik, sistem yang buruk sekalipun akan berubah menjadi baik karenanya.

Namun, dalam kenyataan praktik, dapat terjadi bahwa kedua cara pandang itu sama-sama benar atau pun sebaliknya sama-sama salah. Dalam organisasi yang kecil, faktor orang jauh

Negara dan Pemerintahan

Oleh : Ramlan Surbakti



Apakah Palestina sudah merupakan suatu negara? Apakah Somalia masih dapat dikategorikan sebagai suatu negara? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu lebih dahulu diketahui apa itu negara. Negara merupakan salah satu asosiasi politik, dan asosiasi politik merupakan salah satu asosiasi manusia. Partai Politik, Daerah Otonom merupakan sejumlah contoh asosiasi politik. Keluarga, komunitas agama, dan perusahaan merupakan contoh asosiasi manusia. Apa yang membedakan negara sebagai asosiasi politik dengan partai politik?

Sekurang-kurangnya terdapat lima unsur yang harus terpenuhi oleh suatu asosiasi politik untuk dapat dikategorikan sebagai negara (Madison, 2008). Pertama, penduduk sebagai suatu komunitas politik yang sepakat mendirikan suatu negara. Penduduk ini mungkin berasal dari suatu kelompok etnik atau kelompok agama tertentu sehingga memiliki akar yang sama menjadi suatu komunitas politik. Akan tetapi tidak setiap komunitas politik atas dasar kesamaan suku bangsa atau agama melahirkan suatu negara. Karena itu komunitas politik itu dapat pula berupa penduduk yang berasal dari berbagai kelompok etnik, agama, ras, dan pelapisan sosial lain yang berbeda tetapi sepakat hidup menjadi suatu bangsa karena berbagai faktor pengalaman yang sama. Setiap negara mengalami proses pembentukan bangsa yang berbeda yang pada umumnya dapat dibedakan menjadi tiga model: model Eropah yang dapat disebut sebagai satu etnik membentuk suatu negara (ethnic state); model Arab atau Amerika Latin, yaitu satu suku bangsa dan satu agama (Arab dan Islam dengan perkecualian di Libanon yang sebagian beragama Kristen) mendirikan banyak negara Arab atau Bahasa Sepanyol (kecuali Bahasa Portugis di Brazil) dan beragama Katolik mendirikan

DAFTAR PUSTAKA

- bakti, Nusa ikrar. gayatri, irine h. (2002). Unitary State Versus Federal State: Searching for an Ideal Form of the Future Indonesia State. In *National Democratic Institute for International Affairs*.
- Elgie, R. (2011). *Semi-Presidentialism*. Oxford University Press.
- Jugclaussen, J. (2012). *Republic vs Monarchy: How Sound is Your Constitution?*
- Lijphart, A. (1992). *Parliamentary versus Presidential Government*. Oxford University Press.
- Madison. (2008). A Defintion Of The State. *Domination and Power*.
[http://philosophy.wisc.edu/hunt/A
Standford Encyclopedia of Philosophy](http://philosophy.wisc.edu/hunt/AStandford Encyclopedia of Philosophy). (2006). Republicanism.
- UUD Amerika Serikat, (1776).
- Weber, M. (1919). The Vacation Lecturer. In *Politics as A Vocation*.

Bentuk Negara: Unitarianisme vs. Federalisme

Oleh : Purwo Santoso



A. Pendahuluan: Mencari Jalan Keluar Dari Polemik Perenial

Dalam kebanyakan pembahasan *textbook* dua bentuk negara yang sangat populer, yakni ‘kesatuan’ dan ‘federal’ diperlakukan sebagai pilihan, dan oleh karenanya tata-negara ataupun tata pemerintahan adalah persoalan pemberlakukan isi/pesan dalam *textbook* tersebut. Realita dan praktek pemerintahan didekteknan oleh isi *textbook*, bukan didekteknan oleh keperluan menemukan tatanan yg optimal/ideal. Idealita itu sudah diselesaikan oleh *textbook*, dan para praktisi tinggallah mempraktekkan ajaran.

Tulisan ini tidak bermaksud untuk mengabaikan isi *textbook*, namun mencoba mengaitkan pesan yang dikandung dalam *textbook* dengan keperluan praktis mencari bentuk pemerintahan yang menjawab kebutuhan riil, dalam hal ini kebutuhan Indonesia. Ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak mungkin membicarakan negara tanpa membicarakan masyarakat yang menjadi warga dari negara yang bersangkutan, apalagi ketika kita menyadari bahwa pembahasan tentang negara dilakukan dalam kerangka pemahaman negara-bangsa. Dalam perspektif ini, konteks dan keseksamaan dalam melihat konteks serta pengaruhnya terhadap fenomena negara yang diamati menjadi krusial.

Menyadari arti penting konteks dalam mempelajari dan memahami arti penting konteks dalam cara orang memahami dan membuat pilihan akan sebuah bentuk negara, tulisan ini mencoba melihat bagaimana faktor ini dipahami dalam kajian pemerintahan tentang bentuk negara. Topik tentang bentuk negara ini penting untuk dibahas menginat dalam konteks Indonesia, bentuk negara adalah topik perdebatan yang masih

DAFTAR PUSTAKA

- Burgess, M. (2006). *comparative Federalism Theory and Pratice*. Routledge.
- Gerring, John; Strom C. Thacker, C. M. (2004). *Are Federal Systems better than Unitary Systems?*
- Gie, T. L. (1993). Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia, I, II*.
- Huda, N. (2005). *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah, Perkembangan dan Problematika*.
- Jackiewicz, A. (2012). *Studies in Logic, Grammar and Rhetoric*.
- King, P. (1982). *Federal and Federalism*. Croom Helm.
- Rifqinizamy, M. (2014). No Title“The Doctrine of Federalism in a Unitarian State: A Study of Local Autonomy in Indonesia and Devolution of Power in United Kingdom.” *International Journal of Social Science Studies*, 2(1).
- Riker, W. H. (1975). The Handbook of Political Science. ‘*Federalism*’ in F.I. Greenstein and N.W. Polby, 5, 93–172.



BAGIAN KEDUA PEMERITAHAN DAERAH



Pemerintahan Daerah

Oleh : Sadu Wasistiono



A. Penataan Daerah Otonom

Desentralisasi di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang, berliku-liku serta penuh dengan intrik politik. Perjalannya dimulai dari *decentralisatie wet* tahun 1903 sampai ke UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang saat ini sudah diganti dengan UU baru (UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Pergerakan perubahannya seperti sebuah pendulum, yakni dari satu kutub ke kutub yang lain, dari model yang sangat sentralistik dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan segala konsekuensinya (mencakup antara lain: sumber-sumber keuangan, kepegawaian, tanggungjawab dan lain sebagainya) bergerak menuju kutub desentralisasi. Apabila keputusan politik di tingkat nasional memilih salah satu kutub, selalu ada upaya politik untuk menggerakkan pendulum ke kutub yang lainnya.

Secara teoretis, politik desentralisasi pada negara berbentuk unitaris dapat dibedakan menjadi empat macam yakni antara desentralisasi yang terbatas, desentralisasi setengah hati, desentralisasi berkeseimbangan dinamis, sampai pada desentralisasi yang seluas-luasnya. Dalam perjalanan sejarah desentralisasi yang panjang tersebut, Indonesia telah menjalankan semuanya.

Pada masa Hindia Belanda, terhadap wilayah-wilayah kekuasaan Belanda telah diberikan desentralisasi terbatas yang diatur melalui *desentralisatiwet*. Kemudian pada masa UU Nomor 5 Tahun 1974 diberikan desentralisasi setengah hati, sedangkan menurut UU tentang pemerintahan daerah lainnya,

DAFTAR PUSTAKA

- Adidharta, S. (n.d.). *Dibalik Sejarah DI Yogyakarta*. Kompasiana.Com. sejarah.kompasiana.com/2011/05/17/di-balik-sejarah-di-yogyakarta/-Di%20Balik%20Sejarah%20Yogyakarta.
- Agung Djojosoekarto, Rudiarto Sumarwono, dan C. S. (Ed.). (2008). *Kebijakan Otonomi Khusus di Indonesia – Pembelajaran dari Kasus Aceh, Papua, Jakarta, dan Yogyakarta*. (Cetakan Pe). Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Antaranews.com. (2012). *Indonesian government enforces asymmetric decentralization*.
<https://en.antaranews.com/news/84004/indonesian-government-enforces-asymmetric-decentralization>
- Bhakti, I. N., & Sihbudi, R. (2002). *Kontroversi negara federal: mencari bentuk negara ideal Indonesia masa depan*. Mizan Media Utama.
- Dana Otonomi Khusus Papua Direncanakan Rp. 132 Triliun. (2012). Republika.
<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/08/16/m8usqj-dana-otonomi-khusus-papua-direncanakan-rp-132-triliun>
- Dardias, B. (2012). Menakar Otonomi Khusus Aceh dan Papua. *Kompas*, 1–4.
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=188970>
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah., (1999).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (2001).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, (2006).
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2007).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, (2012).

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonedia. (2014). *Badan Legislasi*. <https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Legislasi>

Grindle, M. S. (2009). *Going Local: Decentralization, Democratization, and the Promise of Good Governance*. Princeton University Press.

Isra, S. (2013). *Palang Pintu Otonomi Khusus Bali*. Lenteratimur.Com. www.lenteratimur.com/palang-pintu-otonomi-khusus-bali/

Joint UNDP-Government of Germany. (1999). Decentralization: A Sampling of Definitions. In *October* (Issue October).

Kebutuhan Bali Otonomi Seluas-luasnya Bukan Otonomi Khusus. (n.d.). Tribunenews.Com. www.tribunenews.com/2013/01/30/kebutuhan-bali-otonomi-seluas-luasnya-bukan-otonomi-khusus.

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. (2011). Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia. In *Partnership Policy Paper* (Issue 1).

Kuhn, T. S. (2000). *The structure of scientific of revolutions - Peran paradigma dalam revolusi sains* (L. Rasjidi (Ed.)). Remaja Rosdakarya.

Litvack, J., Ahmad, J., & Bird, R. (1998). *Rethinking Decentralization in Developing Countries*. The International Bank for Reconstruction. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511559815>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 1 (1945). <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDSuQOHOci4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>

- Martos, A. H. (2001). Rethinking Autonomy Demands in Asymmetrically Devolved Countries. *60th PSA Annual Conference*.
- Mengapa Bali Menuntut Otsus.* (n.d.). Stitidharma.Org. stitidharma.org/mengapa-bali-menuntut-otsus/
- Naisbitt, J. (1994). *Global Paradox: The Bigger the World Economy, the More Powerful Its Smallest Players* (1st Editio). William Morrow & Co.
- Nasution, A. B., Alrasid, H., & Amal, I. (1999). *Federalisme untuk Indonesia* (S. Sularto & T. J. Koekerits (Eds.)). Kompas.
- Palang Pintu Otonomi Khusus Bali.* (n.d.). Lenteratimur.Com. www.lenteratimur.com/palang-pintu-otonomi-khusus-bali/
- Undang-Undang 1945 Nomor 1 Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah, 1 (1945). <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&souce=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww. ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>
- Tillin, L. (2007). United in Diversity? Asymmetry in Indian Federalism. *Publius*, 37(1), 45–67.
- Tuntutan Otonomi Khusus Bali Kembali Bergulir.* (n.d.). Tempo.Co. www.tempo.co/read/news/2013/02/04/058459086/p-Tuntutan-Otonomi-Khusus-Bali-Kembali-Bergulir
- Utomo, T. W. W. (2009). *Balancing Decentralization and Deconcentration: Emerging Need for Asymmetric Decentralization in the Unitary States* (Issue 174). <http://www.gsid.nagoya-u.ac.jp/bpub/research/public/paper/article/174.pdf>
- Watts, R. L. (2000). *Asymmetrical decentralization: functional or dysfunctional.*

White, S. (2011). *Government Decentralization in the 21st Century - A Literature Review* (Issue December).

Wikipedia. (n.d.-a). *Bhinneka Tunggal Ika*.
https://id.wikipedia.org/wiki/Bhinneka_Tunggal_Ika

Wikipedia. (n.d.-b). *Decentralization*.
<https://en.wikipedia.org/wiki/Decentralization>

Perkembangan Pemahaman dan Konsep Desentralisasi

Oleh : Irfan Ridwan Maksum



Semula definisi desentralisasi dapat dibedakan menurut pakar yang mengkaji, antara pakar-pakar eropa kontinental dan pakar-pakar Inggris Amerika (Hoessein, 1993). Desentralisasi dalam pengertian pakar eropa kontinental sama dengan yang diungkap oleh ahl-ahli Indonesia di atas, menyangkut penyerahan wewenang politik dan administrasi.

Pakar Inggris Amerika, memasukan definisi desentralisasi bukan hanya penyerahan wewenang tetapi didalam konsep tersebut dapat bermakna devolusi, dekonsentrasi, privatisasi dan delegasi. Devolusi dalam pengertian tersebut, sama dengan desentralisasi menurut pakar eropa kontinental. Sebagaimana yang dituliskan oleh Hoessin sebagai berikut (Muluk, 2006):

Devolution dalam khazanah Inggris tersebut merupakan padanan kata *political decentralization* dalam pustaka Amerika Serikat dan *staatskundige decentralisatie* dalam pustaka Belanda. Sementara *deconcentration* dalam khazanah Inggris merupakan padanan dari *administrative decentralization* dalam pustaka Amerika Serikat dan *ambtelyke* atau *administrative decentralisatie* dalam khazanah Belanda. Dari perspektif pemerintahan Indonesia, *devolution* merupakan padanan dari desentralisasi, dan *deconcentration* merupakan padanan dari dekonsentrasi, dan *delegation* adalah padanan dari desentralisasi fungsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, C. (1976). *State and Local Governments*. USA: McGraw-Hill.
- Amra, M. (1978). *Muslim, Amrah*. Bandung: Alumni.
- Atmosudirjo, P. (1981). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bailey, H. J. (1993). *State and Local Government and Politics*. Itacha Illinois: FE. Peacock Publichers Inc.
- Bailey, H. J. (1993). *State and Local Government and Politics*. Itacha Illinois: E. Peacock Publichers Inc. .
- Bingham, R. D. (1991). *State and Local Government in A Changing Society*. McGraw-Hill.
- Budisetyowati, D. H. (2004). *Keberadaan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia* . Jakarta: Not Identified.
- Chandler, J. A. (2001). *Local Government Today*. Britain: Manchester University Press.
- Cheema, G.S. dan D.A. Rondinelli. (1983). *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*. London: Sage Publication.
- Cohen, James, M., dan Peterson, Stephen, B.,. (1999.). *Administrative Decentralization: Strategies for Developing Countries*. Connecticut: Kumarian Press.
- Fesler, J. W. (1949). *Area and Administration*. Alabama: Alabama University Press.
- Fried, R. C. (1963). *The Major Traits of Prefectoral Systems, Reprinted from 'The Italian Projects: A Study in Administrtrive Politics* . New Haven and London: Yale University .
- Hoessein, B. (1993). *Berbagai faktor yang mempengaruhi besarnya otonomi dati II: suatu kajian desentralisasi dan otonomi daerah dari segi ilmu administrasi negara*. Publisher not identified: Publisher not identified.

- HumesIV, S. (1991). *Local Governance and Local Government and*. New York: IULA-Harvester.
- Hussain. (2004). *Poverty in Irrigated Agriculture in Developing Asia: Issues, Linkages, Options and Propoor Interventions, Indonesia*. Colombo, Sri Lanka: Country report Indonesia.
- Khairul, M. (2006). *Desentralisasi pemerintahan Daerah*. Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Kortmann, Constantijn AJM., dan Bovend'Eert, Paul, PT. (2000). *Dutch Constitutional Law*. The Hague: Kluwer Law International.
- Koswara. (2001). *Otonomi Daerah: Untuk Demokrasi* . Jakarta: Pariba.
- Leemans, A. (1970). *The Changing Patterns of Local Government*. Netherlands: IULA.
- M.A. Muttalib & Mohd. Akbar Ali Khan. (1983). *Theory of Local Government*. New Delhi: Sterling.
- Maas, A. (1959). *Area and Power: A Theory of Local Government*. illinois: The Free Press Glencoe.
- Mark Turner dan David Hulme. (1997). *Governance, Administration and Development (Making The State Work)*. London: Palgrave.
- Mizany, K. d. (2002). *What's So Special About Special District?* California: California: A citizen's Guide to Special District in California .
- Muluk, K. (2006). *Desentralisasi dan pemerintahan daerah*. Jakarta: Bayumedia.
- Norton, A. (1994). *International Handbook of Local and Regional Government: A Comparative Analysis of Advanced Democracies*. Edward Elgar.
- Oentarto,I Made Suwandi, Dodi Riyadmadji. (2004). *Model Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*. Jakarta: Samitra Media Utama.

- Sarwoto. (1981). *Administrasi Pemerintahan Perancis*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sherwood, R. (2019). *Intellectual Property and Economic Development*. New York: Routledge.
- Smith, B. (1985). *Decentralization: The Territorial Dimension of The State*. London: George Allen and Unwin.
- Syafrudin, A. (1985). *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Bandung: Bina Cipta.
- Vermillion, D. (1997). *Impacts of irrigation management transfer: A review of the evidence*. Colombo, Sri Lanka: Research report 11.

Hubungan Kewenangan Antara Pusat dan Daerah

Oleh : M.Aries Djaenuri



Hubungan Kewenangan antara Pemerintah pusat dengan daerah asalnya dari penyerahan kewenangan dari pemerintah Pusat kepada daerah berkenaan dengan pengelolaan urusan pemerintahan tertentu. Dilihat dari sudut pengertian konsepnya terdapat hal-hal yang mendasar yang perlu memperoleh penjelasan agar pemahaman terhadap kewenangan itu lebih lengkap dan komprehensif utamanya berkenaan dengan pengertian kewenangan, prinsip-prinsip penyerahan kewenangan dan pembagian kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah

Dalam sejarah pemerintahan Indonesia telah terjadi beberapa kali perubahan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah sejalan dengan perubahan kondisi ketatanegaraan Indonesia pada saat itu. Perubahan ini telah mempengaruhi hubungan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, mengingat kebijakan hubungan kewenangan dimaksud tercantum dalam substansi peraturan perundangan yang mengatur tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Berkenaan dengan pemerintahan di daerah diatur dalam pasal 18, berdaar pasal ini dikeluarkanlah Undang-Undang tentang pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan daerah; kemudian terjadi perubahan Undang-Undang Dasar pada tahun 1949 yaitu dengan berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 masih tetap berlaku

DAFTAR PUSTAKA

- Bardhan Pranab and Mookherjee Dilip. (2006), Decentralization and Local Governance in Developing Countries A Comparative Perspective, the MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London
- Djaenuri, Aries. (2002). *Hubungan Pusat – Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta.
- Fauzan, Muhammad. (2006). *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah*. Yogyakarta. UII Press.
- Gie, The Liang. (1995). *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta. Liberty.
- Grindle Meilee,S. (2007), Going Local Decentralization, Democratization and The Promise of Good Governance, Princeton University Press, Princeton and Oxford
- Halim Abdul, Majid Ibnu. (2009). *Problem Desentralisasi dan Pembagian Kewenangan Pemerintahan Pusat – Daerah*. Yogyakarta. Sekolah Pasca Sarjana UGM.
- Karim, Abdul Gaffar (Ed). (2006). *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Kertapraja, Koswara. (2002). *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta. PT Candi Cipta Paramuda.
- Muluk Khairul, M. R. (2007). *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang. Bayu Media Publishing.
- Muttalib, M.A., Khan Ali Akbar (1983), Theory of Local Government, Sterling Publishers Private Limited, New Delhi, Bangalore, Jullundur
- Nurcholis, Hanif. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Paragoan, Wall. (2000). *Otonomi atau Federalisme, Dampaknya Terhadap Perekonomian*. Jakarta. Suara Pembaruan bekerja sama dengan Pustaka Sinar Harapan.

Situmorang, Sodjuagon. (2002). *Mode Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten, Kota (Ringkasan Desertasi Tidak Diterbitkan)*. Jakarta. Pasca Sarjana FISIP UI.

Smith, Brian C. (1985). Decentralization The Territorial Dimension Of The State, George Allen & Unwin, UK



**BAGIAN KETIGA
POLITIK PEMERINTAHAN DAN
ADMINISTRASI DAERAH**



Birokrasi dan Politik

Oleh : R. Siti Zuhro



A. Pendahuluan

Sejak merdeka Indonesia bersepakat memilih sistem pemerintahan yang demokratis. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, ideologi negara Indonesia. Tetapi, harus diakui bahwa penerapannya tidak mudah. Sejarah Indonesia mencatat bahwa sistem pemerintahan demokratis yang dicoba dibangun dalam era demokrasi parlementer atau demokrasi liberal tahun 1950-an gagal. Selama puluhan tahun sistem pemerintahan Indonesia terperangkap dalam sistem yang otoriter.

Seiring dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru 1998 Indonesia kembali memasuki babak baru yang berusaha untuk membangun sistem demokrasi. Walaupun tak mulus, harus diakui bahwa ada banyak perubahan yang terjadi terkait dengan pelaksanaan demokrasi tersebut, baik di tataran nasional maupun lokal. Salah satunya adalah menyangkut pembentukan birokrasi di kedua tataran tersebut.

Idealnya demokratisasi dan debirokratisasi² berjalan secara simultan dan saling melengkapi. Perubahan sistem politik dari sistem otoritarian ke sistem demokrasi seharusnya bisa menunjukkan perbaikan dan perubahan yang signifikan

² Secara sederhana debirokratisasi adalah penghapusan atau pengurangan hambatan yang terdapat dalam sistem birokrasi. Debirokratisasi merupakan upaya untuk menyederhanakan dan merampingkan birokrasi publik agar disfungsi birokrasi dapat dikurangi. "Debureaucratization or decrease in bureaucratism is the process of removing the monopoly of a few bureaucrat-politicians in the government. This is done by making room for the participation of citizen organizations in the country governance" (<https://id.wiktionary.org/wiki/>; <http://wiki.answers.com/>)

Tantangan Kualitas Pemerintahan dalam Perubahan Global dan Transformasi Digital

Oleh : Eko Prasojo



A. Pendahuluan

Pemerintahan saat ini dihadapkan pada perubahan dunia yang bersifat eksponensial ganda (*double exponential*). Perubahan ini telah memporakporandakan kemampuan pemerintahan untuk mengejar dan merespon tingkat harapan juga kebutuhan masyarakat yang sangat cepat. George Vielmetter and Yvone Sell dalam bukunya Leadership 2030 (2014) menyampaikan 6 megatrends 2030 yang akan mengubah wajah pemerintahan secara dramatis dan radikal. *Pertama*, Globalisasi 2.0 yaitu bergeraknya pusat kemajuan dan pertumbuhan ekonomi dari timur ke barat. China dan India akan mengambil peran kepemimpinan tersebut. *Kedua*, krisis energi and kerusakan lingkungan yang massif yang menyebabkan terjadinya potensi perang di berbagai belahan dunia untuk memperebutkan sumber daya energi. *Ketiga*, perubahan demografi kependudukan menuju kepada populasi yang menua (*aging society*). *Keempat* perkembangan massif teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan era digital, era dimana masyarakat selalu mengawasi apa yang dilakukan oleh pemerintah (*people always on*). *Kelima*, konvergensi atau bersatunya perkembangan berbagai teknologi baru seperti nano, bio, robotic dan IT akan menyebabkan sebuah era baru yang akan merombak tatanan struktural, kultural dan sosial masyarakat serta bangsa secara global. Dan *keenam*, menguatnya gejala individualisme dan pluralisme yang lahir dari masyarakat dengan penghasilan yang lebih tinggi (*higher income society* dari generasi milenial)(Vielmetter & Sell, 2014).

DAFTAR PUSTAKA

- Bank, A. D. (2012). *Asia 2050: Realizing The Asian Century*. Asian Development Bank. www.adb.org/sites/default/files/asia2050-executive-summary.pdf
- Benington, J., & Moore, M. H. (2010). *Public Value: Theory and Practice*. Macmillan International Higher Education.
- Burns, J. P. (1994). Civil Service Reform in China. *Asian Journal of Political Science*, 2(2), 44–72. <https://doi.org/10.1080/02185379408434044>
- Caiden, G. (1968). Administrative Reform. *International Review of Administrative Sciences*, 34(4), 347–354. <https://doi.org/10.1177/002085236803400404>
- Fukuyaman, F. (2004). *State in Building. Governance and World Order in the 21st Century*. Cornell University Press. *Global Competitiveness Index*. (n.d.).
- Kim, P. S. (2017). The development of modern public administration in East Asia. *International Review of Administrative Sciences*, 83(2), 225–240. <https://doi.org/10.1177/0020852316685162>
- Lan, Z. (2001). Understanding China ' S Administrative Reform. *Public Administration Quarterly*, 24(4), 437–468.
- Neo, B. S., & Chen, G. (2011). *Dynamic Governance: Embedding Culture, Capabilities, and Change in Singapore*. Westview Press.
- Peters, B. G., & Pierre, J. (2006). *Handbook of Public Policy*. SAGE Publication.
- Pollit, C., & Bouckaert, G. (2000). *Public Management Reform: A Comparative Analysis*. Oxford University Press.
- Stoker, G., & Evans, M. (2016). *Evidence-based Policy Making in the Social Sciences. Methods that Matter*. Policy Press Bristol.
- The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential*. (2012). www.mackinsey.com

Vielmetter, G., & Sell, Y. (2014). *Leadership 2030. The Six Megatrends* (Amacom (Ed.)).

World Factbook. (n.d.). CIA.

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html>

Perkembangan Birokrasi di Indonesia

Oleh : Miftah Thoha



Kehidupan birokrasi pemerintah sejak awal sudah tidak bisa dihindari keterlibatannya dengan partai politik. Di Indonesia kehidupan partai politik dikenal semenjak adanya Maklumat X Wakil Presiden tahun 1945. Banyak partai politik yang dibentuk oleh rakyat berdasarkan maklumat ini. Sebelumnya ketika Pemerintah Proklamasi dibentuk, susunan kabinetnya sama sekali tidak ditempati oleh orang-orang partai. Saat itu belum terbentuk partai politik. Kabinetnya disebut kabinet presidensiel yang dipimpin oleh Presiden. Kabinet ini berusia dari tanggal 19 Agustus 1945 sampai dengan 14 November 1945. Kabinet ini berusia sangat singkat. Struktur dan sistem pemerintahannya pun belum tertata dengan baik dan efektif. Karena selain ada maklumat Wakil Presiden tersebut juga karena desakan dari tokoh nasional yang vokal Sutan Syahrir untuk membentuk kabinet parlementer. Inilah sebenarnya penyimpangan pertama dari UUD 45, karena undang-undang dasar ini menetapkan mengikuti pemerintahan persedensiel akan tetapi kenyataannya di arahkan berdasarkan maklumat itu ke sistem parlementer. Mulai saat itu kabinet kedua dan seterusnya dijabat oleh orang-orang partai politik dan bertanggungjawab kepada parlemen. Semenjak itu pula sistem birokrasi pemrintahan dipimpin oleh partai politik. Akan tetapi pada pada tanggal 29 Januari 1948 Kabinet parlementer yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin II (Partai Sosialis) jatuh, dan diganti oleh Kabinet Presidensil I yang dipimpin oleh Wakil Presiden Hatta terbentuk pada tanggal 29 Januari 1948 dan berakhir pada tanggal 4 Agustus 1949. Dalam Kabinet Presidensial ini semua kementerian dipimpin oleh orang-orang partai politik.

Mendekatkan Spirit Konstitusi dalam Pengaturan Pemerintahan Daerah

Oleh : Muhadam Labolo



A. Pendahuluan

Pengaturan pemerintahan daerah pasca amandemen konstitusi (UUD 1945) tampak lebih luas dan jelas. Keluasan itu terlihat dari berkembangnya Pasal 18 menjadi 7 ayat, pasal 18A dan pasal 18B masing-masing tersusun dari 2 ayat. Sebelum amandemen, pasal 18 berdiri tunggal yang mengatur pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Rumusan sederhana itu menjadi pijakan dalam membentuk susunan dan sistem pemerintahan di daerah, serta afirmasi bagi sejumlah daerah khusus. Pasca amandemen, perubahan pasal 18 mengatur tentang susunan pemerintahan, asas penyelenggaraan pemerintahan, pemilu legislatif, mekanisme pemilihan kepala daerah, prinsip otonomi, serta susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pasal 18A memperjelas hubungan terkait wewenang, keuangan, pelayanan dan pemanfaatan sumber daya antara pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan pasal 18B merupakan rekognisi negara terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, serta satuan masyarakat hukum adat yang masih eksis dan lestari di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- De Tocqueville, A. (2005). *Revolusi, Demokrasi, dan Masyarakat*. Jogjakarta: Obor Indonesia.
- Djohan, D. (2015). *Bahan paparan Dirjen Otda Kemendagri Tentang isu-isu strategis Pemilu*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Hobbes, T. (1651). *Leviathan*. London: Andrew Crooke.
- Koswara. (2000). Menyongsong Pelaksanaan Otonomi daerah. *Jurnal Bisnis dan Birokrasi*.
- Manan, B. (2001). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi UII.
- MiftahThoha. (2016). Hubungan Pusat dan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal MIPI*, hal 1 Vol 1, Jakarta.
- Muchlis Hamdi & Koswara. (1995). *Kajian Asas-Asas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: IIP.
- Mutallib dan Akbar Ali Khan. (1983). *Theory of Local Government*. India: Tosius Inc/ Advent Books Division.
- Rasyid, R. (2004). *Resentralisasi Otonomi Daerah*. Jakarta: Yarsif Watamponne
- Stoddart, J. M. (1995). *Encyclopedia Americana*.
- Sudarsono. (2021). *pangti Penanganan Pandem*. Jakarta: DetikNews.
- Supriyatna, T. (1996). *Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara

Paradoks Sentralisasi Politik dan Desentralisasi Pemerintahan: Membangun Demokrasi yang Mensejahterakan

Oleh : Nurliah Nurdin



A. Pendahuluan

Pembukaan UUD 1945 yang disepakati tidak diubah pada empat kali amandemen konstitusi telah secara jelas menuliskan amanah *founding fathers* bahwa kemerdekaan diraih sebagai pintu gerbang untuk membangun Indonesia menjadi negara kesejahteraan modern (*modern welfare state*). Bunyi tersebut adalah, “..... membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia... untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial....”. Tahapan kemerdekaan kita tersebut dipertahankan dalam model pemerintahan demokrasi yang untuk memilih pemimpin yang amanah bagi rakyat mulai dari pemilihan Presiden sampai kepala daerah. Keputusan untuk melakukan pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentakpun menjadi pilihan untuk mempercepat kesejahteraan tersebut dengan prinsip efisiensi dan efektivitas pemilihan para pemimpin negeri.

Kita telah melewati tahapan Pilkada Serentak 2019 (Rahadian, 2018), berdasarkan data Bawaslu terdapat 816 permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu 2019 yang terjadi di seluruh tingkatan di Indonesia (Bawaslujombangkab, 2019). Kita sama menyaksikan besarnya peranan partai politik dalam menentukan pemimpin daerah dan pemimpin negeri ini. Pemimpin yang dihasilkan dari Pilkada dan Pilpres inilah yang diharapkan bisa mempercepat kesejahteraan rakyat sebagaimana harapan Reformasi tahun 1998 yang melahirkan

DAFTAR PUSTAKA

- ACLC. (n.d.). Kepala Daerah Terjerat Rasuah. Retrieved from <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/tata-kelola-pemerintahan/infografis/kepala-daerah-terjerat-rasuah>
- ANTARA Sulsel. (2009). *Dua Parpol Tolak Calon Bupati Incumbent.* Retrieved from <https://makassar.antaranews.com/berita/8378/dua-parpol-tolak-calon-bupati-incumbent>
- Bawaslujombangkab. (2019). Bawaslu Tampung 816 Permohonan Penyelesaian Sengketa Selama Pemilu 2019. *Jombang.Bawaslu.Go.Id.* Retrieved from <https://jombang.bawaslu.go.id/2019/10/bawaslu-tampung-816-permohonan-penyelesaian-sengketa-selama-pemilu-2019.html>
- BPS. (2021a). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2021 mencapai 72,29, meningkat 0,35 poin (0,49 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (71,94).* Retrieved from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/15/1846/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-tahun-2021-mencapai-72-29--meningkat-0-35-poin--0-49-persen--dibandingkan-capaian-tahun-sebelumnya--71-94-.html>
- BPS. (2021b). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2021 turun menjadi 10,14 persen.* Retrieved from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html>
- Dihni, V. A. (2021). Tetap Terkendali, Utang Luar Negeri RI Capai US\$ 423,5 Miliar pada Agustus 2021. Retrieved from databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/18/tetap-terkendali-utang-luar-negeri-ri-capai-us-4235-miliar-pada-agustus-2021 website:
- Fachrudin, F. (2017). Masyarakat Diimbau Pilih Kepala Daerah yang

- Peduli Lingkungan. *Kompas.Com*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/10/14314611/masyarakat.diimbau.pilih.kepala.daerah.yang.peduli.lingkungan?page=all>
- Keuda Kemendagri. (n.d.). *Daerah Korup Parpol Harus Dihukum*.
- Khalid, K. (2021). Darurat Ekologis. *Kompas.Id*. Retrieved from <https://www.walhi.or.id/darurat-ekologis>
- Oktaveri, J. A. (2017). IOD: Mahar, Dinasti Politik, dan Calon Tunggal Kian Merisaukan di Pilkada. *Bisnis.Com*. Retrieved from <https://kabar24.bisnis.com/read/20170326/15/640383/iod-mahar-dinasti-politik-dan-calon-tunggal-kian-merisaukan-di-pilkada>
- Paat, Y. (2015). Tolak Mahar Politik, Sebastian Salang Batal Jadi Calon Bupati. *Beritasatu.Com*. Retrieved from <https://www.beritasatu.com/nasional/294624/tolak-mahar-politik-sebastian-salang-batal-jadi-calon-bupati>
- Rahadian, L. (2018). Hasil Pilkada 2018 di 17 Provinsi Sesuai Rekapitulasi Suara di KPU. *Tirto.Id*. Retrieved from <https://tirto.id/hasil-pilkada-2018-di-17-provinsi-sesuai-rekapitulasi-suara-di-kpu-cNUk>
- Rifdah. (2021). Survei WCY 2021: Daya Saing Indonesia Naik ke Peringkat 37, Ini Catatannya. *Bisnis.Com*. Retrieved from <https://www.feb.ui.ac.id/blog/2021/08/20/survei-wcy-2021-daya-saing-indonesia-naik-ke-peringkat-37-ini-catatannya/>
- Rondinelli, D. A., Nellis, J. R., & Cheema, G. S. (1983). *Decentralization in developing countries: A review of recent experience*. Washington, D.C: The World Bank.
- Taher, A. P. (2018). Mengapa Sulit Mengungkap Praktik Mahar Politik di Pilkada? *Tirto.Id*. Retrieved from <https://tirto.id/mengapa-sulit-mengungkap-praktik-mahar-politik-di-pilkada->

cDpu?utm_source=PushNotif&utm_campaign=1113&utm_medium=Notification

Terungkap, Besarnya Biaya Sewa Parpol Untuk Pilkada. (n.d.).

UU Nomor 10. (2010). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.*

UU Nomor 23. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*

Vishnu, S. (2017). *Kilas Politik dan Hukum : Calon Tunggal Dapat Muncul Lagi.* Retrieved from <http://rumahpemilu.org/Kilas-Politik-Dan-Hukum-Calon-Tunggal-Dapat-Muncul-Lagi/>

Wijaya, I. G. P. (2019). Perlu Rp 12,38 Miliar Buat Biaya Saksi di TPS. *NusaBali.Com.* Retrieved from <https://www.nusabali.com/berita/46246/perlu-rp-1238-miliar-buat-biaya-saksi-di-tps>

World Bank. (n.d.). Political decentralization. Retrieved from <http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/political.htm>



BAGIAN KEEMPAT

HUKUM DAN ETIKA

PEMERINTAHAN



Negara Sebagai Sistem Hukum Inkonsistensi Undang-Undang dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Oleh : Anthon Raharusun



A. Pendahuluan

Sebagai negara hukum (*rule of law/rechtstaat*) merupakan salah satu isu yang penting dalam perbincangan global di hampir setiap negara di seluruh dunia saat ini. Sebagaimana terlihat dalam pertemuan para pemimpin dan kepala negara dunia dalam sidang umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang berkomitmen mempromosikan negara hukum dalam *Declaration of High-Level Meeting of The General Assembly on The Rule of Law at The National and International Level* pada September 2012 di New York (Indonesia Legal Roundtable, 2014).

Merujuk *World Justice Project*, sebuah proyek nirlaba global yang bertujuan mengukur dan membandingkan tingkat ketaatan suatu negara terhadap prinsip-prinsip negara hukum di dunia, negara hukum menjadi penting karena menyediakan kesempatan dan kesetaraan bagi semua komunitas guna menawarkan pertumbuhan ekonomi (*economy growth*) yang berkelanjutan, pemerintahan yang akuntabel, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Indonesia Legal Roundtable, 2014). Lebih lanjut, dikatakan oleh *World Justice Project* bahwa apabila negara hukum berjalan dengan efektif dan (*konsisten:kursif oleh penulis*), maka dapat membantu mengurangi korupsi, mengembangkan kesehatan publik, meningkatkan pendidikan, mengurangi kemiskinan, dan melindungi masyarakat dari bahaya dan ketidakadilan baik dalam skala besar maupun skala kecil, (*termasuk konsisten terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan: kursif oleh penulis*)

DAFTAR PUSTAKA

- Andrei Marmor. (2008). *The Ideal of The Rule of Law*. USC: Legal Studies Research Paper, Series.
- A.A.GN Ari Dwipayana. (2011). *Menata Desentralisasi Indonesia*,“ Makalah pada Seminar yang Diselenggarakan oleh Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- A.V. Dicey. (1952). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, McMillan and CO, Limited St. Martin’s Street, London.
- A.A. Oka Mahendra. (2006). *Reformasi Pembangunan Hukum dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan*, Ed, Soekedy, Jakarta: Depkumham.
- Baharuddin Lopa. (1987). *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Bhenyamin Hoessein. (2009). *Perubahan Model, Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi*, Edisi Revisi, Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Bayu Dwi Anggono. (2014). *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia* Jakarta: Konpress.
- Esmi Warasih. (2005). *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosilogis*, Cet.1, Semarang, PT. Suryandaru Utama.
- Hikmanto Juwana. (2006). “*Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia*”, presentasi pada acara Dies Natalis Universitas Indonesia ke-56.
- John Rawls. (1977). *A Theory of Justice*, The Balknap Press of Harvard University Press, Massachusetts.

- Kotan Y. Stefanus. (1986). *Pengembangan Desentralisasi Asimetris Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Makalah: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Lawrence Friedman. (1972). *Law and Development, A General Model*, dalam Law and Society Review, No. VI.
- _____. 1986. *Legal Culture and Welfare State*, dalam Gunther Teubner (Ed), *Dilemas of Law in the Welfare State*, Berlin-New York: Walter de Gruyter.
- Laporan Indeks Negara Hukum 2013 Jakarta. (2014). Indonesia Legal Roundtable.
- Maria S.W. Sumardjono. (2013). *Memaknai Kembali Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Tindaklanjutnya*, Disampaikan pada Kuliah Inaugurasi. Yogyakarta.
- _____. (2012). *Harmonisasi Regulasi Antar Sektor Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam* (Makalah disampaikan pada Semiloka Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan, diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Oentarto, I Made Suwandi dan Dodi Riyadmadji. (2004). *Menggugat Format Otonomi Daerah Masa Depan*, Jakarta, Samitra Media Utama.
- Padmo Wahjono. (1989). *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Indo-Hill-co.
- Shidarta dan Jufrina Rizal. (2014). *Pendulum Antinomi Hukum: Antologi 70 Tahun Valerine J.L. Kriekhoff*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Satjipto Rahardjo. (1983). *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- _____. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press.
- Satya Arinanto. (2011). Materi Kuliah Teori Hukum Tata Negara (Aspek Negara Hukum dan Demokrasi pada Program

Pascasarjana (Program Doktor), Jakarta: Universitas Indonesia.

William J. Chambliss & Robert B. Seidman. (1971). *Law, Order and Power*, Reading Mass: Addisin-Wesly.

Demokrasi dan Etika Publik

Oleh : Haryatmoko



A. Pendahuluan

Mengamati perkembangan demokrasi di Indonesia, nampak ada masalah besar yang membelit, yaitu partisipasi demokrasi dalam masyarakat dengan tingkat pendidikan yang belum merata sangat rentan rekayasa. Ternyata mekanisme keputusan demokrasi hanya di tangan sekelompok orang terbatas, yaitu pimpinan partai politik, pengusaha dan birokrat. Dalam banyak kasus, kelompok tersebut beralian dengan media. Masalah lemahnya partisipasi dan representasi itu tidak bisa dilepaskan dari peran partai politik yang terlalu dominan dengan dampak korupsi kartel-elite. Wakil rakyat lebih tunduk kepada pimpinan partai atau kepentingan mereka sendiri. Akuntabilitas hanya untuk memenuhi formalitas. Jadi partai politik sebagai instrumen demokrasi justru menjadi bagian masalah.

Lemahnya akuntabilitas dan transparansi menyebabkan korupsi merasuki semua bidang kehidupan, dari eselon paling atas sampai tingkat paling bawah dalam pelayanan publik, dari sektor swasta ke lembaga swadaya masyarakat. Jadi korupsi tidak hanya menjangkuti *political society*, tetapi juga *civil society*. Refleksi kritis atas memburuknya pelayanan publik dan integritas publik menjadi keprihatinan utama etika publik. Etika publik sangat peduli terhadap modalitas tindakan, tidak berhenti pada niat baik. Etika publik diperlukan untuk pembaharuan dan perbaikan pelayanan publik. Konflik kepentingan, korupsi, dan birokrasi yang berbelit menyebabkan buruknya pelayanan publik. Masalahnya bukan hanya terletak pada kualitas moral seseorang (*jujur, adil, fair*), namun juga pada sistem yang tidak kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Baron, M.W., 1997:Three Methods of Ethics: A Debate, Oxford: Blackwell
- Bertram I., 2005, Fighting Corruption in Developing Countries, Bloomfield: Kumarian Press
- Bishop, P. (ed.), 2003, Management Organisation, and Ethics in the Public Sector, Burlington: Ashgate
- Boisvert,Yves, Crise de confiance et crise de legitimité: de l'éthique gouvernementale à l'éthique publique, Revue internationale d'éthique sociétale et gouvernementale, vol. 4, no 1, Printemps 2002, 19-31.
- Bowman, James S., 2010: Achieving Competencies in Public Services. The Professional Edge, Second Edition, Armonk N.Y.: M.E.Sharpe
- Camm, Frank & Stecher, Brian M., 2010: Analyzing the Operation of Performance-Based Accauntability Systems for Public Services, Santa Monica: Rand Education
- Dowdle, Michael W., 2006: Public Accountability. Designs, Dilemmas and Experiences, Cambridge: CUP
- Drüke, Helmut, 2007: *Can E-Government Make public Governance More Accountable?*, in: A. Shah, Performance Accountability and Combating Corruption, Washington DC: The World Bank, hlm. 59-87
- Elahi K.Q-I., UNDP on Good Governance, dlm. *International Journal of Social-Economics*, 2009: 36 (12), 1167-1180
- Fleishman, J. L., 1981: Public Duties: The Moral Obligation of Government Officials, Cambridge, Massachussetts: HUP.
- Jabbar, Joseph G., and Dwivedi, O.P., 1988, Public Service Accountability, West Hartfort Connecticut: Kumarian Press
- Jenkins, Rob, 2007, The Role of Political Institutions in Promoting Accountability, in: A. Shah, Performance Accountability

and Combating Corruption, Washington DC: The World Bank, hl. 135-182

Kernaghan, Kenneth, 1993, Promoting Public Service Ethics, in: *Ethics in Public Service*, Ottawa: Carleton University Press.

Peeters, B.Guy, 2007, *Performance-Based Accountability*, in: A. Shah, Performance Accountability and Combating Corruption, Washington DC: The World Bank, hlm.15-32

PUMA, *Note de Synthèse, Service de la Gestion Publique*, OCDE 23April 1998 Strøm, Kaare (ed.), 2003: Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies, Oxford: Oxford University Press

Dimensi Etika Politik dan Pemerintahan

Oleh : Achmad Charris Zubair



A. Pendahuluan

Binatang mempunyai "kelebihan" dibandingkan dengan makhluk lain. Kelebihan tersebut adalah naluri yang sangat didukung oleh kemampuan fisik binatang tersebut dalam rangka kelangsungan hidupnya. Organ tubuh seekor rusa misalnya telah menyesuaikannya untuk hidup di padang rumput, dan organ seekor kera telah mencocokkannya untuk hidup di antara pohon-pohon. Meskipun gerak binatang jauh lebih tidak terikat dibandingkan tumbuh-tumbuhan, tetapi sesungguhnya binatang juga merupakan makhluk yang hidup dalam simbiosis kuat dengan alam. Binatang membutuhkan dan mengharapkan hal-hal sangat tertentu dari alam, seperti lingkungan, makanan, perlindungan, kebersamaan dengan jenisnya, dan mencari secara aktif untuk memperolehnya dan untuk meloloskan diri dari ancaman atas hidup dan kelangsungan kehidupan. Kedudukannya terhadap lingkungannya bersifat stabil, terikat, dan tidak bebas, binatang tidak pernah memiliki pilihan hidup (Kleden, 1987, p. 142-143). Hal ini tentunya membuat binatang akan punah apabila habitatnya rusak. Disatu sisi binatang diciptakan untuk 'siap pakai' tetapi disisi lain binatang tidak disiapkan untuk memanipulasi habitatnya. Karena itu, setiap gerak dan aktivitas binatang bersifat alamiah. Oleh karena itu tidak ada baik buruk, benar salah dalam gerak aktivitas binatang. Binatang tidak menyadari perlunya moralitas dan tidak memerlukan moralitas.

Manusia memang secara prinsipal juga memiliki pengetahuan naluriah. Namun, untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, baik secara pribadi maupun secara sosial, manusia tidak cukup hanya mengandalkan pengetahuan naluriahnya

DAFTAR PUSTAKA

- Bakker, A. & Zubair, A. C. (1990). *Metodologi filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Frederickson, H. G. (1994). *Administrasi negara baru*, (A. G. Usman, Trans). Jakarta: LP3ES.
- Goodin, R. E., & Philip, P. (1997). *Contemporary political philosophy*. Massachusetts: Blackwell Publisher.
- Kleden, I. (1987). *Sikap ilmiah dan kritik kebudayaan*. Jakarta: LP3ES.
- Magnis-Suseno, F. (1987). *Etika politik*. Jakarta: Gramedia.
- Meehan, J. (1997). Interpretation and social science: A review essay of James Bohman's new philosophy of social science. In G. Psathas. *Human Studies*, 20(4), 429–440.
- Maran, R. R. (2001). *Pengantar sosiologi politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mustansyir R., Zubair, A. C., Trisakti, S. B., Santoso, H., Wahyudi, A., & Tjahyadi, S. (2002). *Kedudukan ilmu pemerintahan di antara disiplin ilmu lain pendekatan filsafat ilmu*. Program Penelitian Kerja Sama Fakultas Filsafat UGM dengan Institut Ilmu Pemerintahan Departemen Dalam Negeri.
- Schmandt, H. J. (2002). *Filsafat politik*. (A. Baidlowi & I. Baehaqi, Trans). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siagian, S. P. (1984a). *Filsafat administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Siagian, S.P. (1984b). *Peranan staf dalam manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Siagian, S.P. (1985). *Analisis serta perumusan kebijaksanaan dan strategi organisasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Surianingrat, B. (1980). *Mengenal ilmu pemerintahan*. Jakarta: Aksara Baru.
- Van Peursen, C. A. (1976). *Strategi kebudayaan* (D. Hartoko, Trans). Yogyakarta: Kanisius.

Woller, G. M. (1998). Toward a reconciliation of the bureaucracy and democratic ethos. *Administration & Society*. 30(1).

Perkembangan Sistem Norma Menuju Terbentuknya Sistem Peradilan Etika

Oleh : Jimly Asshiddiqie



A. Gambaran Umum tentang Etik

1. Bidang Kajian Etika

Secara umum dalam garis besarnya, etika atau '*ethics*' merupakan satu cabang filsafat yang memperbincangkan tentang perilaku benar dan salah (*right and wrong*) dan baik dan buruk (*good and evil*), dan bahkan relasi-relasi sosial (*social relations*) dan makna keberagamaan (*religious meaning*) dalam hidup manusia (Graham, 2010). Filsafat etik tidak hanya menaruh perhatian pada soal benar dan salah seperti dalam filsafat hukum, tetapi lebih dari itu juga persoalan baik dan buruk. Tujuan utamanya adalah kehidupan yang baik, "*the good life*", bukan sekedar kehidupan yang selalu benar dan tidak pernah salah. Namun dalam praktik, keduanya menyangkut substansi yang menjadi esensi pokok persoalan etika, yaitu benar dan salah (*right and wrong*), serta baik dan buruknya (*good and bad*) perilaku manusia dalam kehidupan bersama.

Namun, dalam perbincangan konkret sehari-hari, kebanyakan orang biasanya lebih mengutamakan soal benar atau salah, '*right or wrong*' saja (Fieser, n.d.). Karena, benar-salah ini lebih mudah dan lebih jelas dipandang mata. Sedangkan soal 'baik-buruk' kurang mendapat perhatian karena ukurannya seringkali bersifat relatif. Dalam soal makanan saja pun, orang Islam diajarkan oleh al-Quran agar hanya makan "makanan yang halal lagi baik", tetapi dalam praktik yang dipikirkan orang hanya "makanan yang halal" (*halalan*) saja, dan cenderung abai dengan sifat-sifat "makanan yang baik" (*thoyyiban*). Padahal, dalam al-Quran,

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2009). *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar 1945*. Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2012). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika.
- Bartlett, R. C., & Collins, S. D. (2012). *No Title*. The University of Chicago Press.
- Basu, D. Das. (1993). *Introduction to the constitution of India*. Prentice Hall.
- Blackburn, S. (1996). *Dictionary of Philosophy*. Oxford University Press.
- Bowie, N. (1989). *Business Ethics* (2nd ed.). Prentice-Hall.
- Doolan, B. (1994). *Constitutional Law and Constitutional Rights in Ireland* (4th ed.). Gill and MacMillan.
- Fieser, J. (n.d.). *Ethics*. The Internet Encyclopedia of Philosophy. Retrieved December 6, 2021, from <https://iep.utm.edu/ethics/>
- Frey, R. G., & Wellman, C. H. (2003). *A Companion to Applied Ethics*. Blackwell.
- Graham, G. (2010). *Theories of Ethics: An Introduction to Moral Philosophy*. Routledge.
- Guthrie, W. (1956). *A History of Greek Philosophy* (4th ed.). Cambridge University Press.
- Harris, J. (1985). *No Title*. Routledge and Kegan Paul.
- Hart, H. L. A. (1961). *The Concept of Law* (The Claren).
- Hauert, C. (2005). *Reward and Punishment*. Univie. www.univie.ac.at/virtuallabs/RewardAndPunishment
- Hazairin. (1950). *Kesusilaan dan Hukum* (Pidato Pengukuhan Guru Besar).

- Herman, M. (1999). *Applying Professional Standards and Ethics in the 21st Century*. American Society for Public Administration.
- Horne, C. (2009). *The Rewards of Punishment: A Relational Theory of Norm Enforcement*. Standford University Press.
- How ASHA's Board of Ethics Sanctions Individuals Found in Violation of the Code of Ethics.* (n.d.). The American Speech-Language-Hearing Association. Retrieved December 6, 2021, from <https://www.asha.org/Practice/ethics/sanctions/#sthash.zmiueNHW.dpuf>
- Johnson, C. E. (2012). *Organizational Ethics: A Practical Approach*. SAGE Publication.
- Jones, H. S. (1998). *Comte: Early Political Writings*. Cambridge University Press.
- Kaagzi, M. J. (2001). *The Constitutional of India Vol.1 & 2*. India Law House.
- Kelly, J. M. (2003). The Irish Constitution. In *The Irish Constitution* (4th ed.). Lexis Nexis Butterworth.
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law*. University of California Press.
- Kelsen, H. (2007). *General Theory of Law and State*. Wedberg.
- Kenny, A. (1978). *The Aristotelian Ethics: A Study of The Relationship between the Eudemian and Nicomachean Ethics of Aristotle*. Clarendon Press.
- Keogh, D., & McCarthy, A. (2007). *The making of the Irish Constitution 1937*. Mercier Press.
- Kohn, S. M. (2001). *Concepts and Procedures in Whistleblower Law*. Quorum Books.
- Kohn, S. M., Kohn, M. D., & Colapinto, David, K. (2004). *Whistleblower Law: A Guide to Legal Protections for Corporate Employees*. Preager.
- May, L., Wong, K., & Delston, J. (2010). *Applied Ethics: A Multicultural Approach* (5th ed.). Prentice Hill.

- McLean, L. (2004). Thomas Jefferson, John Adams, and the Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. In *The future of liberal democracy: Thomas Jefferson and the Contemporary World*. Palgrave Macmillan UK.
- Middlekauff, R. (2005). *The Glorious Cause: The American Revolution, 1763–1789*. Oxford University Press.
- Morgan, J. H. (2013). *The New Irish Constitution*. RareBooksClub.com.
- Morreim, E. H. (1995). *Balancing Act: The New Medical Ethics of Medicine's New Economics* (5th ed.). Georgetown University Press.
- Naagarazan, R. (2006). *Textbook on Professional Ethics and Human Values*. New Age International Publisher.
- Pangle, T. L. (1988). *The Laws of Plato*. Chicago University Press.
- Paulson, B. L., & Paulson, S. L. (1992). *Introduction to the Problems of Legal Theory*. Oxford University Press.
- Peursen, V. (1976). *Strategie van de Cultuur*.
- Pickering, M. (1993). *Auguste Comte: an intellectual biography*. Cambridge University Press.
- Pojman, L. P. (2011). *Environmental Ethics: Reading in Theory and Application* (6th ed.).
- Pylee, M. V. (1999). *India's constitution*.
- Shidarta. (2010). Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan. In *Republik Indonesia, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara* (p. 3). Komisi Yudisial.
- Singer, P. (1986). Applied Ethics. In *Oxford Readings in Philosophy*. Oxford University Press.
- Soekanto, S., & Purbacaraka, P. (1993a). *Perihal Kaedah Hukum*. Citra Aditya Bakti.

- Soekanto, S., & Purbacaraka, P. (1993b). *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Stewartd, I. (1990). The Critical Legal Science of Hans Kelsen. *Journal of Law and Society*, 17(3), 273–308.
- Tavani, H. T. (2006). *Ethics and Technology: Ethical Issues in an Age of Information and Communication Technology* (2nd ed.). John Wiley and Sons.
- Taylor, C., Nomos, & Phusis. (n.d.). *Democritus and Plato Philosophy* (Corpus Christi College (Ed.)). Oxford University Press.
- Warres, E. (1962). No Title. Jewish Theological Seminary.
<http://politicalquotes.org/node/18543#sthash.HL6wNkL0.dpuf>
- Whittingtoh, K. E. (n.d.). On the Need for a Theory of Constitutional Ethics. *Constitutional Corner*, 9(3), 60–66.
- Wills, G. (1978). *Inventing America: Jefferson's Declaration of Independence*. Double Day.
- Woods, M. J. (1992). No Title. In *Aristotle's Eudemian Ethics*. Clarendon Press.
- Zikria, B. A. (1967). Adab al-Tabib. *American Philosophical Society*, 57(3).

Etika Pemerintahan

Oleh : Joko Siswanto



A. Pengantar

Banyak pakar menyamakan era globalisasi dengan istilah “liberasasi ekonomi” atau “pasar bebas”, “Westernisasi” atau “Amerikanisasi”, “proliferasi teknologi informasi” atau “revolusi internet”, dan “integrasi global”. Di samping globalisasi telah menciptakan integrasi pasar modal dengan keuntungan yang dihasilkan dari perluasan perdagangan dunia dan bahwa perdagangan bebas dan pasar terbuka memberikan prospek terbaik bagi penciptaan lapangan kerja, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan standart hidup di seluruh dunia; namun globalisasi ternyata melahirkan sejumlah problema moral yang harus dipikirkan dan dicari pemecahannya secara sungguh-sungguh.

Dalam beberapa pikiran pokok persoalan moral itu dapat dirumuskan. Pertama, apakah era globalisasi menawarkan sebuah “moral universal” atau semacam “etik global” sebagaimana pernah diperkenalkan oleh Kung dan Kuschel (1999)? Kemudian bagaimana kedudukan “moralitas lokal” yang mungkin telah sekian lama dijadikan orientasi dan referensi moral bagi para pendukungnya? Apakah etik global berupaya menghidupkan sumber daya moral dan spiritual dari moralitas lokal? Kalau dalam era globalisasi orang mengatakan: “*think globally, act locally*”, bagaimana cara yang dapat diusahakan untuk mengkombinasikan berbagai kekayaan pemikiran global yang diserap dari segala penjuru dunia dengan komitmen untuk melakukan langkah nyata pada arus lokal? (Siswanto, 2010).

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, L. (2000). *Kamus filsafat*. Jakarta: PT. Gramedia Utama.
- Bakker, A. & Zubair, A. C. (1990) *Metodologi filsafat*. Yogyakarta: Karisius.
- Berten, K. (2002). *Etika*. Jakarta: Gramedia.
- De Vos, H. (1987). *Pengantar Etika*. (S. Soemargono, Trans). Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Dwiyanto, A. (Ed). (2006). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres.
- Fudyartanta. (1974). *Etika intisari filsafat kesusilaan dan moral*. Yogyakarta: Warawidyani.
- Handoyo, E Dkk. (2010). *Etika politik dan pembangunan*. Semarang: Widya Karya.
- Hardono Hadi. (1994). *Hakikat dan muatan filsafat pancasila*. Yogyakarta: kanisius.
- Hersey, P., & Blanchard, K. (1982). *Manajemen perilaku organisasi pendayagunaan sumber daya manusia* (4th ed). Jakarta: Erlangga.
- Hunnex, M. D. (2004). *Peta filsafat : pendekatan kronologis dan tematis* (Zubair, Trans).
- Kattsoff, L. O. (1986). *Pengantar filsafat* (S. Soemargono, Trans). Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Keraf, G. (1991). *Tata bahasa rujukan bahasa indonesia untuk tingkat pendidikan menengah*. Jakarta: Gramedia Widiasrana Indonesia.
- Kumorotomo, W. (1992). *Etika administrasi negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kung, H., dan Kuschel K. (1999). *Etik Global* (A. Murtajib, Trans). A global ethic, the declaration of the parliament of the world's religions. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Latif, Y. (2013). Pendidikan sebagai keteladanan. *Kompas*.
- Magnis-Suseno, F. (1975). *Etika umum: Masalah-masalah pokok filsafat moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Magnis-Suseno, F. (1987). *Etika Politik prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*. Jakarta: P.T Gramedia.
- Magnis-Suseno, F. (1991). *Etika sosial*. Gramedia. Jakarta.
- Magnis-Suseno, F. (1997). *Mencari sosok demokrasi : sebuah telaah filosofis*. Jakarta: Gramedia.
- N. Drijarkara S. J. : Yogyakarta. Kanisius. 1968,
- Makarenko, J. (2007). *Ethics in government: Concepts, issues & debates*. New York.
- Mangunhardjana, A. (1997) *Isme-isme dalam Etika dari A sampai Z*, Yogyakarta: Kanisius,
- Notonagara. (1971). *Pancasila secara ilmiah populer*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.
- Notonagara. (1974). *Pancasila dasar falsafah negara*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.
- Poedjawiyatna. (2003). *Etika filsafat tingkah laku*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Poespawardojo, S. (1989). *Filsafat pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- Poespoprodjo, W. (1999). *Filsafat Moral: Kesusilaan Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Pustaka Grafika
- Rachels, James. 2004. *Filsafat moral* (A. Sudiarja, Trans) Yogyakarta: Kanisius
- Rawls. (1971). *A theory of justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Salam, D. S. (2004). *Manajemen pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Siswanto, J. (2004). *ABC pancasila: Refleksi Komprehensif hal-halihwal pancasila*. Yogyakarta: Philosophy Press.

- Siswanto, J. (2010). *Wajah globalisasi*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Supriyadi, G. 2001. *Modul diklat prajabatan golongan III: Etika birokrasi*. Jakarta: LAN RI.
- Syafie, I. K. (1994). *Etika pemerintahan*. Jakarta: P.T. Rineka Cipta.
- Syafie, I. K. (2001). *Filsafat pemerintahan*. Jakarta: P.T. Perca.
- Teichman, J. (1998). *Etika sosial*. Kanisius. Yogyakarta.
- Tim Penyusun Komisi Pemberantasan Komisi. (2009). *Panduan penanganan konflik kepentingan bagi penyelenggara negara*. Jakarta: Penerbit KPK.
- Van Peursen, C. A. (1990). *Fakta, nilai dan peristiwa tentang hubungan antara ilmu pengetahuan dan etika* (S. Keraf, Trans). Jakarta: Gramedia.
- Widjaja. A. W. (1991). *Etika pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wulansari, E. M. (2014). Pengaturan tentang etika penyelenggara negara dalam rancangan undang-undang. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, hlm. 1 – 10.
- Zamroni. (2011). *Strategi dan model implementasi pendidikan karakter*. Yogyakarta: UNY Press.
- Zubair, A. C. (2002). *Dimensi etik dan asketik ilmu pengetahuan manusia*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI).

Laman:

- http://www.academia.edu/5669081/ETIKA_PEMERINTAHAN_DAN_POLITIK
- <http://www.slideshare.net/kangpanjie/etika-pemerintahan-35150019>
- <http://arifmunandar.yu.tl/etika-pemerintahan-dan-politik.xhtml>
- <http://prianirini.blogspot.com/2014/01/etika-pemerintahan.html>

<http://cumidarad.blogspot.com/2013/01/makalah-etika-pemerintahan.html>

http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/ETIKA%20PENYELENGGARA%20NEGARA.pdf

<http://mapleleafweb.com/features/ethics-government-concepts-issues-debates>



BAGIAN KELIMA KESEJAHTERAAN SOSIAL

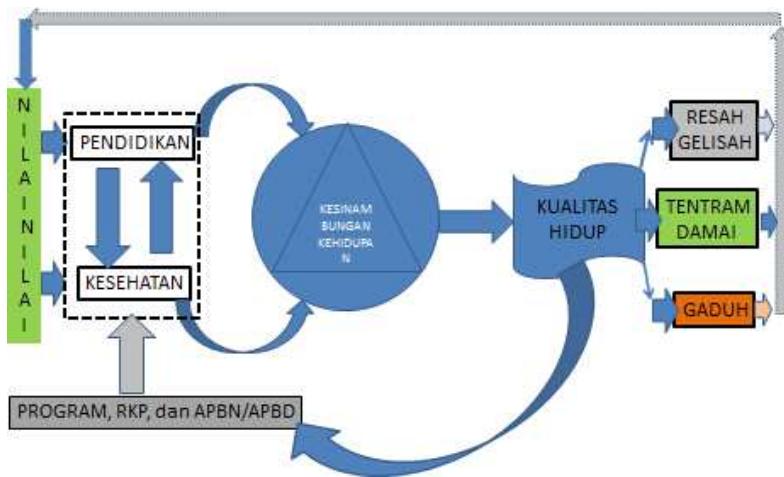


Pemerintah dan Kesejahteraan Masyarakat (IPM)

Oleh : Ichsanuddin Noorsy



Pada 16 September 2016 saya diundang Kementerian Kesehatan membahas konsep *Indonesia 2045*. Dalam diskusi mengenai hal itu, saya membatasi diri pada masalah pendidikan dan kesehatan sebagai hajat hidup orang banyak sebagaimana diagram di bawah ini. Dalam konsep saya, pendidikan dan kesehatan sangat menentukan langkah kehidupan suatu bangsa ke depan. Kondisi dua sektor ini memposisikan status sosial ekonomi seseorang atau suatu keluarga, bahkan suatu bangsa.



Dalam model berpikir sistemik struktural itu, saya berpandangan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak mungkin ditakar hanya menurut kekayaan ekonomi semata. Buat apa suatu bangsa mempunyai pendapatan perkapita yang tinggi tapi anggota masyarakatnya dihinggapi rasa resah gelisah. Atau antara kelompok masyarakat dalam kegaduhan dengan berbagai sebab. Apalagi jika melihat struktur penguasaan sumber daya ekonomi,

DAFTAR PUSTAKA

- Gourinchas, Marion Fourcade and Babb, L. Sarah. 2002. *The Rebirth of The Liberal Creed: Paths to Neoliberalism in Four Countries*. In American Journal of Sociology. Vol 108, No. 3 (November 2002)
- Stiglitz. 2012. *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*. New York: WW Norton & Company.
- Pane, Nina (editor). 2015. *Mohammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi (!926-1977)*. Jakarta: Kompas

Keberlanjutan Fiskal dan Kesejahteraan Sosial

Oleh : Prasetyantoko



A. Pengantar

Hampir semua negara di dunia memiliki cita-cita untuk menyejahterakan rakyatnya, dengan pendekatan yang berbeda-beda disesuaikan dengan konteks masing-masing negara. Dalam konteks Indonesia, orientasi pada kesejahteraan rakyat sudah dirumuskan oleh *founding fathers* bangsa ini melalui landasan konstitusi, yaitu Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang sering dijadikan rujukan konstitusional bagi penerapan negara kesejahteraan di Indonesia. Meskipun sudah tertuang dalam landasan utama bangsa, tetapi pelaksanaannya tidak selalu selaras, terutama ketika dituangkan dalam kerangka regulasi yang lebih rendah, yaitu Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, ataupun aturan lainnya.

Dalam tatanan perekonomian yang semakin kompleks, upaya mewujudkan cita-cita negara kesejahteraan memang semakin rumit. Kawasan Eropa yang selama ini menjadi *role model* penerapan prinsip negara kesejahteraan kini sedang mengalami krisis hebat. Oleh karena itu, banyak wacana mengenai kematian negara kesejahteraan (*the death of welfare state*). Kejadian yang sama terjadi ketika tembok Berlin runtuh, yang menunjukkan adanya wacana tentang matinya paham sosialisme (*the death of socialism*). Kenyataan ini menjadi tantangan penting bagi negara berkembang seperti Indonesia yang tengah berupaya merealisasikan sistem negara kesejahteraan melalui berbagai tatanan ekonomi-sosial-politik tertentu.

Pengalaman kolapsnya perekonomian di kawasan Eropa yang selama ini dikenal berkomitmen kuat menjalankan prinsip negara kesejahteraan tentu menjadi bahan penting dalam

DAFTAR PUSTAKA

- Agnello and Sousa. (2014). How Does Fiscal Consolidation Impact on Income Inequality?. *Review of Income and Wealth*, 60 (4), 702-726. <https://doi.org/10.1111/roiw.12004>
- Asher, M G. (2012). Social Pensions for the Elderly in Asia: Fiscal Costs and Financing Methods. In S. W. Handayani & B. Babajanian (Ed). *Social Protection for Older Persons: Social Pensions in Asia.* (pp. 60-80) Manila: ADB.
- Atkinson, A. B, Piketty, T & Saez, E. (2011). Top Incomes in the Long Run of History. *Journal of Economic Literature*, 49 (1), 3-71. doi= [10.1257/jel.49.1.3](https://doi.org/10.1257/jel.49.1.3)
- Blanchard, O. J. (1990), "Suggestions for a New Set of Fiscal Indicators". *OECD Economics Department Working Papers*, (79), OECD Publishing.
- Blanchard, O, Chouraqui, J. C, Hageman, R. P, and Sartor, N. (1990), The Sustainability of Fiscal Policy: New Answers to an Old Question. *OECD Economic Studies* (15).
- Boyer, Robert. (2014), *Welfare States and Institutional Complementarity: From North to South*. Geneva: UNRISD.
- Buiter, Willem, H., (2004). The Elusive Welfare Economics of Price Stability as a Monetary Policy Objective: Should New Keynesian Central Bankers Pursue Price Stability?. *NBER Working Papers 10848, National Bureau of Economic Research, Inc.*
- Clements, B. and Coady, D. (2011). *The Challenge of Public pension Reform in Advanced and Emerging Economies*. Washington, D.C: International Monetary Fund, Fiscal Affairs Department.
- CLSA. (2009). *China Indonesia – China, India and Indonesia being Asia's next growth triangle.*
- Cohen, Marjorie Griffin. (2015). The Strange Career of Regulation in the Welfare State. *Econ Journal Watch*, 12 (1), 28-35.

De Castro, F and Hernández de Cos, P. (2008). The Economic Effects of Fiscal Policy: The Case of Spain. *Journal of Macroeconomics*, 30 (3), pp. 1005-1028.

Piketty, Thomas. (2014), *Capital in the Twenty-First Century* (3rd Ed.). (Translated by Arthur Goldhammer). Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press.

Standard Chartered Bank, 2009, *Indonesia: Asia's emerging powerhouse.*

McKinsey Global Institute. (2012), *The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential.*

UNRISD. 2010. *Combating Poverty and Inequality: Structural Change, Social Policy and Politics.* Geneva: UNRISD: Author.

Kemiskinan dan Gagasan Kesejahteraan

Oleh : Ahmad Erani Yustika



Seperti yang dipahami selama ini, persoalan kemiskinan telah sedemikian peliknya untuk diurai dan dipecahkan. Hal ini disebabkan adanya multispektrum makna dan penyebab kemiskinan, sehingga penyelesaiannya tidak mungkin dituntaskan dalam satu kebijakan/program saja. Secara konseptual, perdebatan yang muncul selama ini mengambil tempat yang bisa dipetakan dalam dua sisi yang kerap bertabrakan, yakni mendudukkan kemiskinan dalam aspek ekonomi semata atau memposisikan kemiskinan sebagai isu sosial. Jika kemiskinan dianggap sebagai soal ekonomi, maka biasanya kemiskinan disederhanakan sebagai kekurangan pendapatan (per kapita) atau jumlah kalori yang dikonsumsi oleh individu. Sebaliknya, pendekatan sosial memandang kemiskinan merupakan keterbatasan individu untuk terlibat dalam partisipasi pembangunan, baik akibat ketidakcukupan ketrampilan/pendidikan maupun pengucilan sosial (*social exclusion*), sehingga membuat individu tersebut tidak mampu memperoleh kesejahteraan.

A. Neoklasik vs Kelembagaan

Ilmu ekonomi bisa dibagi dalam empat cakupan berikut (Miller, 1988, p. 50-51): (i) alokasi sumber daya (*resource allocation*), (ii) tingkat pertumbuhan kesempatan kerja, pendapatan, produksi, dan harga (*levels of growth employment, income, production, and prices*); (iii) distribusi pendapatan (*income distribution*); dan (iv) struktur kekuasaan (*the structure of power*). Pendekatan klasik/neoklasik lebih banyak memakai tiga instrumen yang pertama untuk menguliti setiap persoalan ekonomi; sebaliknya pendekatan kelembagaan lebih menekankan kepada piranti yang terakhir untuk menganalisis

DAFTAR PUSTAKA

- Aidukaite, Jolanta. (2009). Old Welfare State Theories and New Welfare Regimes in Eastern Challenges and Implications. *Communist and Post-Communist Studies*, 42, (1), 23-29.
- Aston, Lee J. et al. (2013). Changing Social Contracts: Beliefs and Dissipative Inclusion in Brazil. *Journal of Comparative Economics*, 41, (1), 48-65.
- Chambers, Robert. (1996). *PRA: Memahami Desa Secara Partisipatif*. Yogakarta: Kanisius - Oxfam - Yayasan Mitra Tani.
- Cohen, Joel E. dan David E. Bloom. (2005). Cultivating Minds. *Finance and Development*, 42, (2), 9-14
- Dawe, David and C. Peter Timmer. (2012). Why Stable Food Prices are a Good Thing; Lesson from Stabilizing Rice Prices in Asia. *Global Food Security*, 1 (2), 127-133
- de Soto, Hernando. (2000). *The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else*. London: Black Swan.
- Deolalikar et al. (2002). *Poverty Reduction and the Role of Institutions in Developing Countries*. ERD Working Paper. No. 10. Asian Development Bank
- Finer, Catherine Jones. (1999). Trends and Developments in Welfare States. Dalam Joachen Clasen (ed.). *Comparative Social Policy: Concepts, Theories, and Methods*. Oxford and Massachusetts: Blackwell Publishers.
- Friedmann, John. (1992). *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Blackwell Publishers. Massachusetts
- Hayami, Yuijiro. (1997). *Development Economics: From the Poverty to the Wealth of Nations*. Oxford: Clarendon Press.
- Ismail, Munawar. (1995). *Pemerintah dan Pasar dalam Pembangunan yang Berdimensi Kerakyatan*. Makalah Disampaikan dalam Seminar "Reformasi Etika Teologi Pembangunan Menuju

Transformasi Ekonomi yang Berbasis Kerakyatan. Sema FE Unibraw. Malang

Korten, David C. (1984). *Pembangunan yang Memihak Rakyat: Kupasan Tentang Teori dan Metode Pembangunan*. Lembaga Studi Pembangunan. Jakarta

Korten, David C. dan Sjahrir (Ed.). (1988). *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Kunio, Yoshihara. (2000). *Asia Per Capita: Why National Incomes Differ in East Asia*. London dan Singapura : Curzon Press dan New Asian Library.

Laderich, Caterina Ruggeri *et al.* (2003). Does it Matter that we do not Agree on the Definition of Poverty? A Comparison of Four Approaches. *Oxford Development Studies*, 31 (3): 244-273.

Littel, I.M.D. (2002). *Ethics, Economics and Politics: Principles of Public Policy*. New York: Oxford University Press.

Nabi, Mahmoud Sami. (2015). Equity-Financing, Income Inequity and Capital Accumulation. *Economic Modelling*, 46 (C), 322-333.

Seaman, John A. *et al.* (2014). The Household Economy Approach: Managing the Impact of Climate Change on Poverty and Food Security in Developing Countries. *Climate Risk Management*, 4 (5), 59-68.

Sen, Amartya. (1999). *Development as Freedom*. New York: Anchor Books.

Thomas, Vinod *et al.* (2001). *The Quality of Growth*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Todaro, Michael P. (1997). *Economic Development* (6th Ed.). Massachusetts.

Yeager, Timothy J. (1999). *Institutions, Transition Economies, and Economic Development*. Oxford: Political Economy of Global Interdependence.

Yustika, Ahmad Erani. (2007). *Perekonomian Indonesia: Satu Dekade Pascakrisis Ekonomi*. Malang: BPFE Unibraw.



**BAGIAN KEENAM
BATAS NEGARA DAN HUBUNGAN
LUAR NEGERI**



Manifestasi dan Relevansi Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Oleh : Bambang Hartadi Nugroho



A. Pendahuluan

Doktrin bebas-aktif telah menjadi landasan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan luar negeri Indonesia sejak awal berdirinya Republik hingga saat ini. Doktrin ini dianggap sebagai jawaban atas tantangan yang muncul akibat kondisi politik internasional saat itu yang diwarnai ketegangan antara dua negara adidaya yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Selain itu, doktrin ini juga merupakan cerminan dari kepentingan dan semangat Indonesia sebagai negara yang baru lahir ketika itu untuk memperkokoh posisinya di tengah masyarakat internasional, turut berperan serta dalam mewujudkan perdamaian dunia, serta untuk mewakili suara negara-negara Dunia Ketiga yang baru muncul pasca-gelombang dekolonialisasi usai Perang Dunia Kedua. Semangat itupun diwujudkan melalui peran aktif Indonesia di berbagai forum internasional maupun regional, sembari berusaha menjalin hubungan yang baik dengan kedua negara adidaya ketika itu.

Seiring dengan berakhirnya Perang Dingin, menarik untuk melihat relevansi doktrin bebas-aktif dalam menentukan arah kebijakan luar negeri negara ini, khususnya dengan hilangnya persaingan antara dua negara adidaya yang menjadi salah satu faktor di balik lahirnya doktrin tersebut. Untuk itu, bagian ini berusaha memberikan penilaian mengenai relevansi doktrin bebas-aktif dalam merespon berbagai perkembangan terkini di kancah internasional. Terkait dengan tujuan tersebut, bagian ini dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama mengulas secara singkat mengenai konsep "bebas aktif" sebagaimana dicetuskan oleh para pendiri Republik ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Agus Sriyono. (2004). *Hubungan Internasional: Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia*. Jakarta, Gramedia.
- Christopher Roberts. (2012). *ASEAN Regionalism: Cooperation, Values and Institutionalisation*. New York, Routledge, 40-41.
- CSIS, "Studi Mengenai Implementasi dan Strategi Kemitraan Pendanaan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular".
- Declaration of the Heads of State or Government of the Non-Aligned Countries, diunduh dari
[http://pustakahpi.kemlu.go.id/dir_dok/01st%20Summit%20of%20the%20Non-Aligned%20Movement%20Final%20Document%20\(Belgrade_Declaration\).pdf](http://pustakahpi.kemlu.go.id/dir_dok/01st%20Summit%20of%20the%20Non-Aligned%20Movement%20Final%20Document%20(Belgrade_Declaration).pdf) pada 27 Februari 2015.
- Dewi Fortuna Anwar. (n. d). *Indonesia's Foreign Policy after the Cold War*.
- Fouad Ajami. (19880). *The Fate of Nonalignment*. Foreign Affairs, Vol. 59, No. 2.
- INSouth, diunduh dari
http://www.insouth.org/index.php?option=com_content&view=article&id=56:indonesia&catid=31:country-windows&Itemid=86 pada tanggal 5 Maret 2015.
- Joseph S. Nye, Jr. (2011). *China's Rise Doesn't Mean War*. Foreign Policy, No. 184,
- Kementerian Luar Negeri RI, "Non-Aligned Movement", diunduh dari
<http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=MultilateralCooperation&IDP=3&P=Multilateral&l=en> pada tanggal 28 Februari 2015.
- Kementerian Luar Negeri RI, diunduh dari
<http://www.kemlu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=13&l=id> pada tanggal 20 Maret 2015.

Kementerian Luar Negeri RI, diunduh dari <http://www.kemlu.go.id/Pages/IISissueDisplay.aspx?IDP=2&l=id> pada tanggal 20 Maret 2015.

Kementerian Luar Negeri RI,
<http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDdisplay.aspx?Name=MultilateralCooperation&IDP=12&P=Multilateral&l=en>,
diunduh pada tanggal 1 Maret 2015.

Kementerian Luar Negeri RI,
<http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDdisplay.aspx?Name=MultilateralCooperation&IDP=12&P=Multilateral&l=en>

Kementerian Luar Negeri RI, Statement at the 5848th Meeting, Monday 3 March 2008, 12:45 p.m., diunduh dari <http://www.kemlu.go.id/Documents/Indonesia%20at%20The%20United%20Nations/Latest.pdf> pada tanggal 3 Maret 2015.

Michael Leifer, dikutip dalam Dewi Fortuna Anwar, "Indonesia's Foreign Policy after the Cold War", Southeast Asian Affairs 1994, Singapore, ISEAS, 1994.

Michael Leifer, Politik Luar Negeri Indonesia, Jakarta, Gramedia, 1986.

Mohammad Hatta, "Indonesia's Foreign Policy", Foreign Affairs, Vol. 31, No. 1, 1953.

Natalie Sambhi, "Indonesia's Push for Peacekeeping Operations", diunduh dari <http://www.aspistrategist.org.au/indonesias-push-for-peacekeeping-operations/> pada tanggal 2 Maret 2015.

Prinsip-prinsip Dasasila Bandung diunduh dari http://franke.uchicago.edu/Final_Communique_Bandung_1955.pdf pada tanggal 1 Maret 2015.

Program-program lainnya adalah pengembangan kapasitas di bidang perdagangan dan ekspor; pembangunan infrastruktur dan jalan raya; program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; pengembangan kapasitas

makroekonomi, pendanaan publik dan mikroekonomi; serta pengembangan kapasitas di bidang pengembangan masyarakat. Lihat laporan Center for Strategic and International Studies (CSIS), "Studi Mengenai Implementasi dan Strategi Kemitraan Pendanaan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular", diunduh dari http://www.csis.or.id/index.php?option=com_k2&Itemid=816&id=7_f46c6f6d06dfdc0184b5fc14a1a27d5c&lang=en&task=download&view=item pada tanggal 3 Maret 2015.

Satish Kumar, "Nonalignment: International Goals and National Interests", Asian Survey, Vol. 23, No. 4, 1983.

Sekretariat Kabinet RI, "Tentang Pengembangan Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular", diunduh dari <http://old.setkab.go.id/berita-5174-tentang-pengembangan-kerjasama-selatan-selatan-dan-triangular.html> pada tanggal 5 Maret 2015.

Statement by Minister of Foreign Affairs Republic of Indonesia at the General Debate of the Third Session of the Preparatory Committee for the 2015 Review Conference of the State Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, diunduh dari http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/npt/prepc14/statements/28APRIL_NAM.pdf pada tanggal 28 Februari 2015.

The Jakarta Message: A Call for Collective Action and the Democratization of International Relations, diunduh dari http://cns.miis.edu/nam/documents/Official_Document/10th_Summit_FD_Jakarta_Declaration_1992_Whole.pdf pada tanggal 28 Februari 2015.

The Jakarta Post, "Indonesia to Send 4000 Troops, Helicopters to UN Peacekeeping Missions", diunduh dari <http://thejakartaglobe.beritasatu.com/archive/indonesia->

to-send-4000-troops-helicopters-to-un-peacekeeping-missions/ pada tanggal 2 Maret 2015.

UN Department of Peacekeeping Operations,
<http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/contributors.shtml>, diunduh pada tanggal 3 Maret 2015.

UN General Assembly Resolution 64/222 of 2009, diunduh dari
<http://ssc.undp.org/content/dam/ssc/documents/GA%20Resolutions/GA%20Resolution%202009.pdf> pada tanggal 5 Maret 2015.

UN Office for South-South Cooperation, "The Buenos Aires Plan of Action", diunduh dari
<http://ssc.undp.org/content/dam/ssc/documents/Key%20Policy%20Documents/BAPA.pdf> pada tanggal 5 Maret 2015.

UN Office for South-South Cooperation, diunduh dari
http://ssc.undp.org/content/ssc/about/what_is_ssc.html pada tanggal 5 Maret 2015.

UN Office for South-South Cooperation, diunduh dari
<http://ssc.undp.org/content/ssc/about/Background.html> pada tanggal 5 Maret 2015.

Visi, Misi dan Program Aksi Joko Widodo-Jusuf Kalla, diunduh dari
http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf pada tanggal 20 Maret 2015.

World Bank, diunduh dari
<http://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS> pada tanggal 8 Maret 2015.

World Bank, diunduh dari
<http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD> pada tanggal 8 Maret 2015.

Yayan G.H. Mulyana, "Peacekeeping Operations and Indonesian Foreign Policy", diunduh dari
<http://www.thejakartapost.com/news/2012/01/03/peacek>

eeping-operations-and-indonesian-foreign-policy.html pada tanggal 2 Maret 2015.

Zbigniew Brezinski dan John J. Mearsheimer. (2005). Debate: Clash of the Titans. *Foreign Policy*, No. 146.

Perkembangan Asia Pasifik dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Oleh : Edy Prasetyono



Pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, politik luar negeri Indonesia diarahkan pada tiga isu utama yaitu perlindungan kedaulatan, perlindungan warga negara Indonesia, dan diplomasi ekonomi yang efektif. Ketiga hal ini memang sangat mendasar. Perlindungan kedaulatan mencakup masalah Papua yang langsung menyangkut keutuhan NKRI, menjaga perbatasan, terutama perbatasan laut, dan perlindungan aset-aset atau kekayaan di laut. Perlindungan warganegara terutama ditujukan untuk melindungi para pekerja Indonesia di luar negeri yang sering menghadapi berbagai masalah. Sedangkan agenda ketiga yaitu diplomasi ekonomi diarahkan untuk memperkuat interaksi ekonomi terutama bidang investasi dan perdagangan.

Ketiga agenda tersebut tidaklah mudah. Pada aspek eksternal, Pemerintahan Joko Widodo akan dihadapkan pada perkembangan lingkungan strategis yang bergerak cepat baik dari isu-isu yang muncul maupun perubahan pola-pola interaksi negara-negara di kawasan. Dalam situasi ini Indonesia harus mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah penting yang dihadapi oleh Indonesia dan mengambil langkah-langkah strategis untuk menjadi kekuatan regional dalam aspek-aspek yang menjadi keunggulan Indonesia. Semua ini akan bermuara pada kemampuan Indonesia untuk memenuhi kepentingan nasional Indonesia dalam lingkungan kawasan yang berubah dengan cepat. Oleh karena itu, penting untuk melihat perkembangan di kawasan yang menjadi lingkaran konsentrik paling dekat Indonesia. Perkembangan-perkembangan kawasan akan melahirkan tantangan dan peluang bagi Indonesia yang harus dimaksimalkan untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia.

Perbatasan Negara Republik Indonesia

Oleh : Evi Fitriani



Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki wilayah teritorial yang mencerminkan batas kedaulatan negara ini. Menurut Undang-undang dasar 1945 pasal 25, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang (UU). Menurut UU no 6 tahun 1996, wilayah Indonesia tergambar seperti peta di bawah ini:



Gambar 4. Peta Wilayah Negara Republik Indonesia

Sumber: Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008

Lebih jauh, UU nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara mengindikasikan wilayah Indonesia meliputi darat, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya. Dengan demikian Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini, India, Palau, Australia dan Vietnam. Perbatasan Indonesia dengan kesepuluh negara tersebut dapat dikategorikan ke dalam

DAFTAR PUSTAKA

- Ariadno, Melda Kamil. "Indonesian Case on Illegal Migrant", *International Journal of International Law*, Vol. 9, No. 2, 2012.
- Arisoi, Tien Virginia. "Analisa Kegagalan MOU BLM dalam Mengatasi Masalah Ancaman Keamanan Non-Tradisional di Kawasan Perbatasan Republik Indonesia dan Papua New Guinea Tahun 2008-2011", *Tesis*, Program Magister Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Indonesia. Depok: 2012.
- Agoes, Etty R. "Development toward the Adoption of the FAO Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing", *International Journal of International Law*, Vol. 8, No. 2, 2011
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Need Assessment Pembangunan Batas Wilayah negara dan Kawasan perbatasan. *Laporan Akhir Penelitian* oleh PT. Inter Data Connection. Jakarta: 2012.
- Benu, Yohana Supialfi. "Penanganan Pengungsi Timor Timur oleh UNHCR di Timor Barat (1999-2002)", *Skripsi*, Program Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Indonesia. Depok, 2014.
- Buntoro, Kresna. "Legal and Technical Issues on Designating Archipelagic Sea Lanes Passage: Indonesia Experience", *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 8, No. 2, 2011.
- Darlis, Andi M. "Kebijakan Politik Pertahanan Udara Indonesia – Studi Kasus Penyerahan Kontrol Wilayah Udara Indonesia kepada Singapura", *Tesis*, Program Magister Ilmu Politik, FISIP, Universitas Indonesia. Jakarta: 2013
- Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). "Evaluasi Kebijakan dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia", *Laporan Akhir*. Jakarta:

Sekretariat Jendral DKP – Satuan Tugas Dewan Kelautan Indonesia, 2008.

Dja'far, TB Massa, Fuad, Kairul dan Sulehan, Junaenah, *Tantangan dan Prospek perbatasan Indonesia-Malaysia*, Jakarta: UNAS Press, 2011.

Fitriani, Evi, "Menjaga Pulau-pulau Kita", *Kompas*, 5 Juni 2008.

Fitriani, Evi. "Evolusi Hubungan Indonesia-Malaysia" dalam Evi Fitriani, editor, *Hubungan Indonesia-Malaysia dalam Perspektif Sosial, Budaya, Negara, dan Media: Kasus Perbatasan dan Pekerja Migran*. Depok: UI Press, 2012.

Fitriani, Evi et al. "Menanggulangi *Trans-national Organized Crime* tanpa Melanggar Hak Pengungsi: Masalah Migrasi Iregular dalam Hubungan Indonesia-Australia", *Laporan Penelitian, Hibah Kolaborasi Internasional Universitas Indonesia*. Depok: 2014.

Krasner, Stephen. *Power, the State, and Sovereignty: Essays on International Relations*, London: Routledge, 2009.

Kusumaatmadja, Mochtar dan Agoes, Etty R. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung; Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerja sama dengan Penerbit PT. Alumni, 2013.

Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Edisi kedua. Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2005.

Maranu, Nova, "Singapura dan Kerjasama Open Sky di ASEAN", *Tesis*, Program Magister Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Indonesia, Depok: 2010.

Moeldoko. Efektifitas dan Skenario Planning Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia: Studi Kasus Perbatasan Darat di Kalimantan, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Indonesia. Depok: 2013.

Wirutomo, Paulus, et al. "Konstruksi Konflik Indonesia-Malaysia: Studi Kasus Kompleksitas Ekonomi, Politik, Sosial dan Budaya di Perbatasan", *Laporan Akhir Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.

Stephen Krasner, *Power, the State, and Sovereignty: Essays on International Relations*, London: Routledge, 2009.

Tien Virginia Arisoi, "Analisa Kegagalan MOU BLM dalam Mengatasi Masalah Ancaman Keamanan Non-Tradisional di Kawasan Perbatasan Republik Indonesia dan Papua New Guinea Tahun 2008-2011", Tesis, Program Magister Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Indonesia, Depok: 2012.

Website:

Lokasi Prioritas Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Papua Nugini, <http://perbatasan.org/lokasi-prioritas-wilayah-perbatasan-darat-indonesia-papua-nugini/> Akses tanggal 24 Maret 2015.

Lokasi Prioritas Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Papua Nugini, <http://perbatasan.org/lokasi-prioritas-wilayah-perbatasan-darat-indonesia-papua-nugini/> Akses tanggal 24 Maret 2015.

"PNG protes TNI bergeming ", *Media Indonesia*, 21 Februari 2013.
www.beritasatu.com/hukum/ Akses 24 Maret 2015.

"Indonesia dan Timor Leste Rundingkan Batas Darat dalam Pertemuan ke 27", www.bakosurtanal.go.id diakses 19 Maret 2015

"Petugas Perbatasan RI-Timor Leste Gugup Ditanya Jokowi", News.Liputan6.com/read/ akses 18 Maret 2015

0ld.setkab.go.id/berita-13939 diakses 26 Maret 2015.

www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014 diakses 26 Maret 2015

www.asensec.org/transport/agreement diakses 21 Februari 2012.

“Para Pelintas gelap di Perbatasan Timor Leste”, regional.kompasiana.com/2014/01/27/ diakses 17 Maret 2015.

Jurnal, Skripsi dan Tesis

Agoes, Etty R, “Development toward the Adoption of the FAO Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing”, *International Journal of International Law*, Vol. 8, No. 2, 2011

Ariadno, Melda Kamil, “Indonesian Case on Illegal Migrant”, *International Journal of International Law*, Vol. 9, No. 2, 2012

Chappy Hakim, ‘Mapping dan Perspektif Intelijen tentang Potensi dan Realitas Ancaman yang berhadapan dengan Kedaulatan Indonesia”, Pemaparan dalam Seminar Terbuka Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 6 Desember 2012

Darlis, Andi M, “Kebijakan Politik Pertahanan Udara Indonesia – Studi Kasus Penyerahan Kontrol Wilayah Udara Indonesia kepada Singapura”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Politik, FISIP, Universitas Indonesia, (Jakarta: 2013)

Direktur jendral Perhubungan Udara dalam Seminar Terbuka Program Pascasarjana Universitas Indonesia, “Strategi dan kebijakan Indonesia dalam menghadapi Dampak ASEAN Open Sky 2015 terhadap kedaulatan Wilayah Udara Indonesia’, Jakarta, 6 Desember 2012.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), “Evaluasi kebijakan salam rangka Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) di Indonesia”, *Laporan Akhir*, (Jakarta: DKK Sekretariat Jendral – Satuan Tugas Dewan Kelautan Indonesia, 2008).

Yohana Supialfi Benu, “Penanganan Pengungsi Timor Timur oleh UNHCR di Timor Barat (1999-2002)”, *Skripsi*, Program

Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Indonesia, Depok, 2014.

Fitriani, Evi, "Menjaga Pulau-pulau Kita", *Kompas*, 5 Juni 2008.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara